

EDISI 70 / 2022

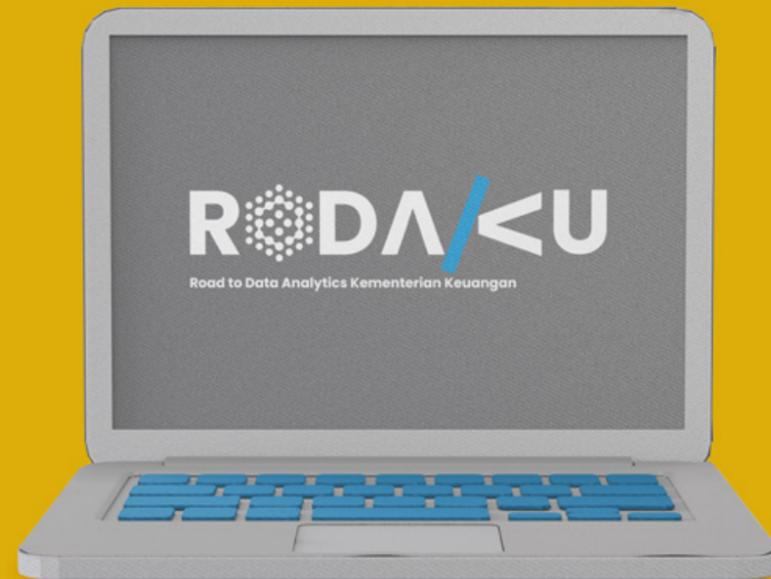
# EDUKASI

## K E U A N G A N

**RODAKU**

*Road to Data Analytics Kemenkeu Satu*





## DAFTAR ISI

SALAM REDAKSI	3
LINTAS PERISTIWA	4
LIPUTAN UTAMA	6
LIPUTAN KHUSUS	18
PROFIL	22
SERAMBI ILMU	29
KOMUNITAS	43
CERITA ALUMNI	47
KESEHATAN	51
POINT OF INTEREST	54
GALERI	56

## Susunan Redaksi

### PENANGGUNG JAWAB

Sekretaris BPPK

### PEMIMPIN REDAKSI

Sugeng Satoto

### REDAKTUR

Tri Budi Murwanto  
Amir Abdulhaji  
Rachmatunnisya  
Arif Mulia  
Hestin Parmawati  
Rita Dwi Lindawati  
Iki Rizal Apriandi  
Rio Suareski  
Sri Wahyuni  
Fajar Prasetyo Yuwono  
Yuniyati Syarifah  
Bambang Kismanto  
Andita Trias Nur Azizah  
Jumali  
Agung Darono  
Puspa Paradisa Puteri H.  
Agung Nugroho Kurnianto  
Achmad Zunaidi  
Gunawan  
Inwan Hadiansyah  
Primandita Fitriandi  
Yohana Tolla

### EDITOR

Abdul Aziz Maghfur  
Arimbi Putri  
Klemens Amy Novianto  
Luqman Hakim

### DESAIN GRAFIS

Ivan Rizki Arviandi

Redaksi menerima artikel untuk dimuat dalam majalah ini. Artikel ditulis dalam huruf Arial 11 spasi 1,5, maksimal 2.500 kata. Artikel dapat dikirimkan ke [edukasikeuangan@kemenkeu.go.id](mailto:edukasikeuangan@kemenkeu.go.id). Isi majalah ini tidak mencerminkan kebijakan Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan

### ALAMAT REDAKSI

Jl. Purnawarman No. 99 Kebayoran Baru,  
Jakarta Selatan 12110  
Telp: +62 21 7394666, 7204131  
Fax: +62 21 7261775  
<http://www.bppk.kemenkeu.go.id>

# Belajar Kepabeanaan & Cukai di sela kesibukan? **Bisa.**



Klik [bit.ly/OpenPBC](https://bit.ly/OpenPBC)  
Ikuti E-Learning Open Access-nya!

**TERBUKA UNTUK UMUM**

 <b>E-Learning E-Commerce (Open Access)</b> Pusdiklat Bea dan Cukai ★★★★★ 4.94 2540 peserta <a href="#">Lihat</a>	 <b>E-Learning Nilai Pabean Untuk...</b> Pusdiklat Bea dan Cukai ★★★★★ 4.86 463 peserta <a href="#">Lihat</a>	 <b>E-Learning Fasilitas...</b> Pusdiklat Bea dan Cukai ★★★★★ 5.00 167 peserta <a href="#">Lihat</a>	 <b>E-Learning Fasilitas KITE IKM Non...</b> Pusdiklat Bea dan Cukai ★★★★★ 5.00 85 peserta <a href="#">Lihat</a>
--	--	---	---



## SALAM REDAKSI

Kesadaran akan pentingnya data semakin meningkat di berbagai instansi pemerintah. Data telah menjadi sumber daya utama selain sumber daya manusia yang menjadi perhatian besar seiring melesatnya komputasi dan kebijakan berbasis data. Kementerian Keuangan melalui Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan (BPPK), menyelenggarakan Road to Data Analytics Kemenkeu (Rodaku) sebagai respons atas pemanfaatan data sebagai basis pengambilan kebijakan. Ulasan lengkap Rodaku dapat Anda simak pada rubrik pamungkas kami, Liputan Utama.

Liputan Utama selalu dirangkai dengan Liputan Khusus, yang menghadirkan berita aktual dan menarik seputar pusdiklat dan Politeknik Keuangan Negara (PKN) STAN. Pada edisi kali ini, Liputan Khusus menghadirkan eksposisi Executive Training for The Winners dari Pusdiklat Kepemimpinan dan Manajerial.

Sosok inspiratif hadir seiring berkembangnya Rodaku yang salah satunya digawangi Pusdiklat Keuangan Umum BPPK. Sosok ini merupakan Srikandi BPPK yang inovatif dan berdedikasi tinggi. Jangan lewatkan ulasan cerita kehidupan dan karir Kepala Pusdiklat Keuangan Umum, Heni Kartikawati melalui rubrik Profil.

Tentunya Majalah Edukasi Keuangan tak akan lengkap tanpa cerita dari peraih beasiswa Kemenkeu melalui Cerita Alumni, lanskap nusantara melalui rubrik Galeri, paparan peristiwa dan tempat tujuan wisata favorit dari berbagai daerah sekitar Balai Diklat Keuangan BPPK melalui rubrik Point of Interest, dan temukan sederet informasi menarik lainnya.

Selamat menikmati sajian-sajian khas dari Majalah Edukasi Keuangan, selamat bereksplorasi menambah pundi-pundi informasi Anda!

# Lintas Peristiwa

## Mei-Juni

### BPPK JALIN KERJA SAMA PENINGKATAN SDM KEUANGAN DENGAN KEMENKEU TIMOR LESTE

Pada tanggal 31 Mei, Kepala BPPK beserta sejumlah pejabat lainnya menyambut jajaran Kemenkeu Timor Leste yang tengah melakukan kunjungan kerja di Indonesia. Pertemuan tersebut menghasilkan beberapa poin penting mengenai dukungan BPPK dalam upaya peningkatan dan pengembangan SDM keuangan pada reformasi keuangan yang tengah dicanangkan oleh Kemenkeu Timor Leste.



### KEPALA BPPK MELANTIK KEPALA PUSDIKLAT PAJAK MENJADI WIDYAISWARA AHLI UTAMA

Kepala BPPK Andin Hadiyanto melantik Kepala Pusdiklat Pajak, Hario Damar sebagai Widyaiswara Ahli Utama di lingkungan BPPK. Dalam sambutannya, Kepala BPPK berharap agar Hario dapat bersinergi dan berkolaborasi dengan jabatan fungsional lain, serta mampu memberikan teladan kepada para widyaiswara lainnya.

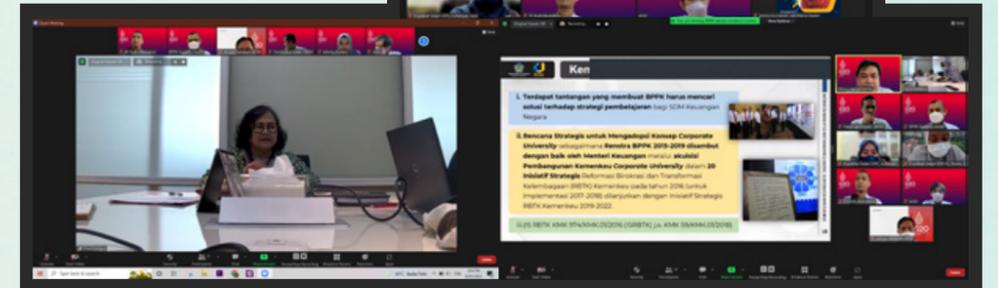
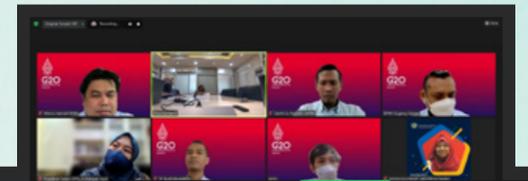


### BPPK SELENGGARAKAN RAKOR LAYANAN PPID 2022

BPPK menyelenggarakan Rapat Koordinasi Layanan Informasi Publik bagi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di lingkungan BPPK secara daring melalui aplikasi Zoom. Rakor ini mengundang pihak Komisi Informasi Pusat (KIP) dan Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan sebagai narasumber untuk menyampaikan isu terkini seputar PPID beserta simulasi aplikasi sistem informasi PPID Kementerian Keuangan.

### KOMITMEN KEMENKEU MEWUJUDKAN LEARNING ORGANIZATION DALAM ENTRY MEETING LEARNING ORGANIZATION 2022

Sekretaris BPPK, Iqbal Islami menyebutkan bahwa *Entry Meeting Learning Organization (LO)* ini merupakan perwujudan komitmen dan keseriusan dari Kemenkeu untuk menjadi sebuah LO. *Entry Meeting* yang diselenggarakan oleh BPPK secara daring ini dihadiri oleh seluruh anggota komite LO Kemenkeu yang bertujuan untuk menelaraskan pengukuran tingkat implementasi LO di Kemenkeu.



### BPPK TERIMA KUNJUNGAN BENCHMARK DARI PUSDIKLAT SETJEN DPR

BPPK menerima kunjungan benchmark dari Pusat Pendidikan dan Pelatihan Sekretariat Jenderal (Pusdiklat Setjen) DPR secara daring melalui aplikasi Zoom. Menurut Kepala Pusdiklat Setjen DPR, Dewi Berliana, *benchmark* ini bertujuan untuk membahas rencana pengembangan transformasi instansi mereka menjadi sebuah badan. Sejumlah narasumber berkompeten dari BPPK berkesempatan untuk menyampaikan *lesson learned* terkait penataan organisasi BPPK, termasuk implementasi *Kemenkeu Corpu* yang dapat memberikan pandangan terhadap Pusdiklat Setjen DPR dalam mewujudkan tujuannya.

TEKS:  
LUQMAN HAKIM  
FOTO:  
DOKUMENTASI BPPK

JOKO KISWORO

# Bangun Budaya Data, Kemenkeu Menginisiasi Workshop RODAKU

“Seru sih, cuma ada satu yang kurang, kurang lama!”. Itulah ungkapan dari Istiqomah Nur Aini, ketika menceritakan pengalamannya dalam mengikuti dua hari Workshop Road to Data Analytic Kemenkeu (RODAKU) di Balai Diklat Keuangan Manado. Sosok yang akrab dipanggil dengan Isti tersebut merupakan pegawai Kanwil DJPB Provinsi Maluku Utara. Menurut Isti, RODAKU dapat membuka pemahaman kita bahwa data analytic itu tidak harus serumit apa yang kita bayangkan. Dengan tools yang relatif mudah dikuasai seperti Ms Excel dan Orange, kita sudah dapat melakukan data analytic untuk mendukung pekerjaan sehari-hari di kantor. Keseruan Isti dalam mengikuti RODAKU tersebut ia ungkapkan secara gamblang dalam Podcast Ngobrol Data Keuangan (NGOTAK) Episode 8 yang dapat disaksikan melalui kanal Youtube Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan.

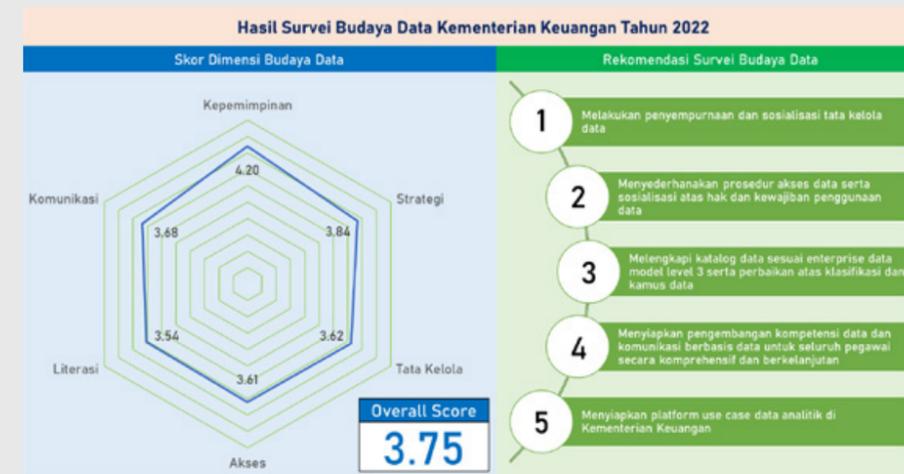
RODAKU merupakan workshop yang diselenggarakan untuk meningkatkan kompetensi pengolahan data bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Instansi vertikal Kementerian Keuangan. Selain itu, RODAKU juga bertujuan untuk mendukung implementasi penggunaan *data analytics* dalam pengambilan keputusan. Mengapa data analytic itu menjadi semakin penting? “Data is the new oil”. Frasa ini diperkenalkan oleh Clive Humby seorang ahli matematika dari Inggris pada tahun 2006. Clive Humby menganalogikan data seperti tambang minyak bumi. Minyak bumi adalah barang yang berharga, namun jika belum diolah, minyak bumi belum dapat dimanfaatkan. Agar memiliki *value*, minyak bumi harus diolah menjadi BBM, gas, bahan kimia, plastik dan sebagainya. Begitu pula dengan data, harus diolah dan dianalisis agar memiliki *value*.

Selaras dengan pendapat Clive Humby, Menteri Keuangan RI, Sri Mulyani Indrawati pernah mengatakan hal yang serupa. “Pada era digital yang disebut tambang adalah tambang data. Tapi tentu data yang kita olah dan pahami”, ujar Sri Mulyani Indrawati dalam acara Penandatanganan Nota Kesepahaman Kementerian Keuangan dengan Badan Pusat Statistik tentang Penyediaan, Pemanfaatan, dan Pengembangan Data dan/atau Informasi pada tahun 2018. Lebih lanjut Sri Mulyani Indrawati menuturkan bahwa Kementerian Keuangan sebetulnya duduk di atas sebuah tumpukan data yang sangat banyak. Tentunya akan sangat disayangkan apabila hal tersebut terus berlanjut. Oleh sebab itu beliau memantik kesadaran seluruh jajarannya agar memiliki budaya data dan berupaya mewujudkan Kementerian Keuangan sebagai *data driven organization*.

Sampai dengan tahun 2022, data dan aplikasi yang digunakan di Kementerian Keuangan tumbuh sangat pesat. Pertumbuhan tersebut harus diiringi dengan pemanfaatan data yang optimal. Hal ini menjadi latar belakang dilaksanakannya Survei Budaya Data

Kementerian Keuangan Tahun 2022. Menggunakan *Data Culture Framework* dari Business Application Research Center (BARC), hasil survei menunjukkan bahwa

budaya data Kementerian Keuangan belum begitu memuaskan di mana skor yang diperoleh adalah 3,75 dari skala 5.



Sumber: Diolah dari Laporan Hasil Survey Budaya Data Kementerian Keuangan Tahun 2022

## LOKASI PENYELENGGARAAN RODAKU 2022



Sumber: Diolah dari Data Penyelenggaraan Workshop RODAKU Pusdiklat Keuangan Umum Tahun 2022

RODAKU dikemas dengan dua *Learning Concept*. Pertama, *easy and fun learning* di mana workshop menggunakan dukungan software yang relatif mudah dikuasai yaitu Ms. Excel dan Orange serta dilengkapi dengan *use case* yang menarik. Kedua, *mini competition* di mana keseluruhan peserta harus mengikuti kompetisi *data analytic* melalui platform Kaggle ([www.kaggle.com](http://www.kaggle.com)) untuk mengimplementasikan pengetahuan yang didapatkan.

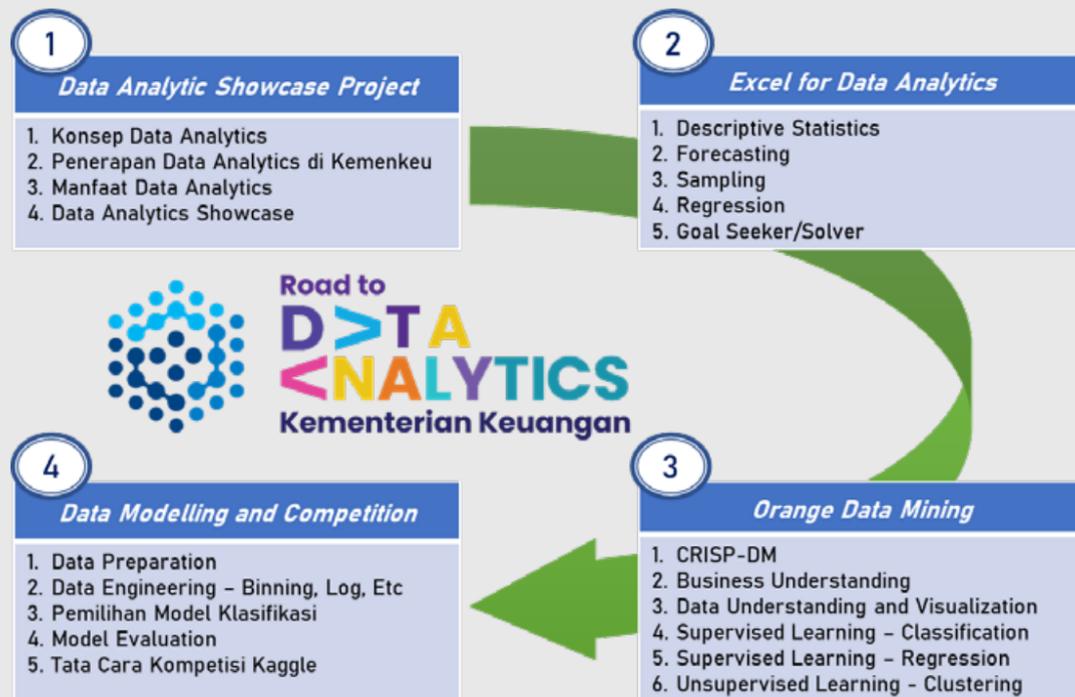
Selama dua hari Workshop, peserta mendapatkan empat materi utama yaitu *Data Analytic Showcase Project* di lingkungan Kemenkeu, *Excel for Data Analytics*, *Orange Data Mining*, dan *Data Modelling and Competition*. Materi-materi tersebut dibawakan oleh para *Data Analyst* dari *Data Management Officers* (DMO) - CTO Kementerian Keuangan serta pengajar dari BPPK yang telah memperoleh Sertifikat *Training of Trainer* RODAKU.

Penyelenggaraan RODAKU di sebelas lokasi Balai Diklat Keuangan mendapatkan penilaian positif dari peserta. Hal ini dibuktikan dengan rata-rata penilaian peserta terhadap kualitas pelayanan penyelenggara yang mencapai indeks 4,65 dari skala 5 (kategori sangat baik). Selain itu, pengajar yang ditugaskan memberikan materi RODAKU merupakan pengajar yang berkualitas. Hal ini ditunjukkan dari rata-rata penilaian peserta terhadap kualitas pengajar yang mencapai indeks 4,78 dari skala 5 (kategori sangat baik).

RODAKU merupakan langkah awal yang baik dari Kementerian Keuangan dalam memperkenalkan *data analytic* bagi jajaran pegawai di daerah. Namun demikian, tentunya hal ini belum cukup untuk membangun kompetensi organisasi yang berfungsi sebagai modal dalam mewujudkan Budaya Data. Kementerian

Keuangan perlu melakukan upaya-upaya lainnya. Tidak terbatas pada pengembangan kompetensi pegawai, kegiatan lainnya seperti pembentukan *Community of Practice*, wadah inkubasi *data analyst*, dan kompetisi *data analytics* akan sangat bermanfaat untuk mendukung *data driven organization*. *Data analytics* memang merupakan topik yang sedang *hype* di kalangan pegawai Kementerian Keuangan. Oleh sebab itu, keseruan lainnya sebagai kelanjutan dari RODAKU sangat dinantikan.

MATERI RODAKU 2022



Sumber: Diolah dari Sumber Eksklusif – CTO Kementerian Keuangan

DINI WIDIANINGSIH

# RODAKU, Behind the Scene



**Data should be at the heart  
of all decision-making**  
- Ernst and Young

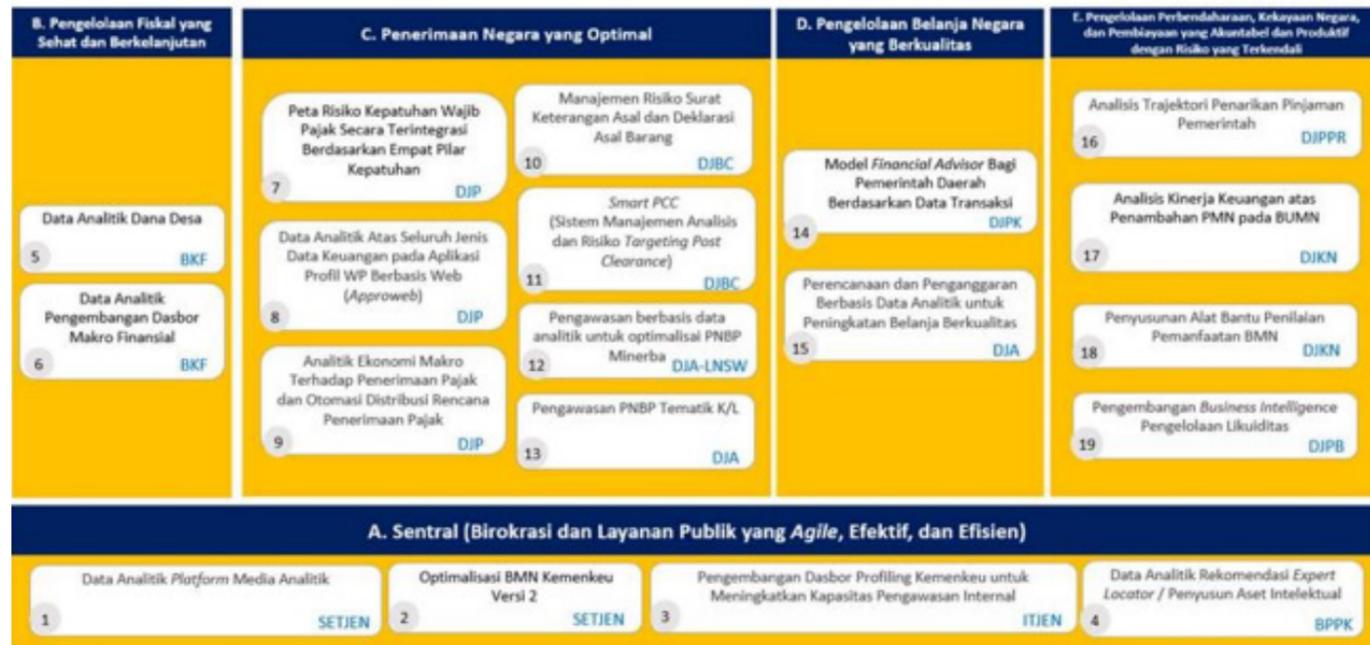
Dewasa ini, data telah mengubah tatanan hidup manusia. Bagi suatu organisasi, data telah menjadi sumber daya yang berharga. Menurut studi *Ernst and Young* (EY), 81 persen organisasi sepakat bahwa inti dari semua pengambilan keputusan adalah data.

Dengan memanfaatkan data, suatu organisasi akan memiliki banyak ruang untuk meningkatkan kemampuannya. Menteri Keuangan Republik Indonesia, Sri Mulyani Indrawati, menyatakan bahwa data adalah salah satu peluang yang dapat membuka jalan untuk maju. Ketika data menjadi bagian strategi serta operasional, inovasi dan progresivitas akan dihasilkan.

Suatu organisasi yang dapat memanfaatkan data dengan optimal disebut *data-driven organization*. Gagasan ini tidak hanya memperlakukan data sebagai aset strategis, namun juga menggunakannya dalam kegiatan sehari-hari. Konsepsi ini menyiratkan bahwa data merupakan bagian penting dari aktivitas suatu organisasi. Data tidak hanya diutilisasi pada level pimpinan, tapi juga diberdayakan pada setiap lapisan. Budaya data harus mengalir dalam benak setiap insan secara institusional.

Kementerian Keuangan, merupakan salah satu institusi yang berupaya untuk menjadi *data-driven organization*. Hal ini ditandai dengan ditetapkannya 26 proyek Inisiatif Strategis Data Analitik pada tahun 2021. Untuk mewujudkannya, berbagai kegiatan data analitik dilakukan. Beraneka program ataupun kegiatan secara masif dikampanyekan. Bentuknya dapat berupa komunitas, kompetisi, *podcast*, webinar maupun pelatihan. Sayangnya, meskipun publikasi gencar diberikan, proyek data analitik hanya populer di suatu kalangan. Kemeriannya hanya dirasakan oleh sebagian kecil golongan. Hanya pegawai dari unit pusat yang menjadikannya sebagai fenomena kekinian.

## INISIATIF STRATEGIS DATA ANALITIK KEMENTERIAN KEUANGAN TAHUN 2022



Gambar 1 Inisiatif Strategis Data Analitik 2022

Sumber: <https://www.kemenkeu.go.id/transformati-kelembagaan/profil-reformasi-birokrasi>

Pada tahun 2022, sebagai komitmen menuju *data-driven organization*, inisiatif strategis Kementerian Keuangan kembali berfokus pada data analitik. Sebanyak 19 proyek inisiatif ditetapkan pada tahun ini. Untuk merealisasikannya, harus ada inovasi yang digulirkan. Mengingat gaung data analitik 2021 kurang menyentuh daerah, maka daerah menjadi salah satu target proyek di tahun 2022. Hasil survei budaya data Kementerian Keuangan pada tahun ini juga menyiratkan bahwa kegiatan sosialisasi di daerah terkait data analitik sangat dibutuhkan.

### INISIATOR

Program penguatan budaya data Kementerian Keuangan merupakan bagian dari transformasi kelembagaan. Agar program tersebut dapat berjalan, dukungan dan komitmen pimpinan diperlukan. Karena itulah, pada tahun

2014, *Central Transformation Office* (CTO) ditetapkan. Tim khusus ini merupakan bukti nyata pimpinan dalam mengawal proses Reformasi Birokrasi dan Transformasi Kelembagaan (RBTK). Menteri Keuangan, Wakil Menteri, dan para pejabat eselon I bertindak sebagai Tim Pengarah pada tim ini. Sementara itu, Tim Pengelola CTO secara umum bertugas untuk memastikan proses transformasi berjalan sesuai dengan harapan. Kepanitiaan khusus ini menjadi unsur penting dalam manajemen perubahan Kementerian Keuangan.

*Central Transformation Office* (CTO) berperan penting dalam memantapkan inisiatif strategis Kementerian Keuangan. Salah satu tugas pokoknya adalah merumuskan program prioritas pengelolaan dan pemanfaatan data. *Key person* dari agenda krusial ini adalah *Chief Data Management Officers* (CDMO). *Chief* ini berkedudukan setingkat di

bawah Ketua Tim Pengelola CTO. Posisi strategis ini setara dengan eselon II dan membawahi dua orang *Officer* (setara eselon III) dan delapan orang *Analyst* (setara eselon IV). *Chief* inilah yang menjadi tumpuan dalam memastikan keberhasilan pemanfaatan data di Kementerian Keuangan.

### KOLABORASI

*“Alone we can do so little; together we can do so much.”*  
– Helen Keller

Inisiasi program data analitik di tahun 2021 belum bisa menjangkau seluruh lapisan Kementerian Keuangan. Budaya sadar data Kementerian Keuangan masih belum sesuai dengan harapan. Karena itu, CDMO mengusulkan suatu gerakan.

Aksi tersebut dinamakan *Data Analytics Roadshow*. Untuk mewujudkannya, CDMO tidak bisa bergerak sendiri. Sebagaimana dikatakan Helen Keller di atas, perlu kolaborasi untuk mempercepat proses menuju *data-driven organization*. Karena itulah, CDMO menggandeng Pusdiklat Keuangan Umum untuk melaksanakannya.

Keterlibatan Pusdiklat Keuangan Umum pada kegiatan ini tentu bukan tanpa alasan. Cahya Gumilar, *person in charge* Desain Pembelajaran RODAKU menyampaikan bahwa sejak 2019 sebenarnya sudah ada pelatihan terkait data analitik di Pusdiklat Keuangan Umum. “Namun kemampuan kami terbatas. Selain itu, bisa jadi pelatihan tersebut masih belum merata cakupannya. Kami selalu upayakan untuk memperbaruinya sesuai kebutuhan. Saat ini, pelatihan data analitik yang kami miliki semakin canggih dan semakin berkembang jenisnya,” katanya.

Arief Tirtana, salah satu Data Analyst CTO juga berpendapat sama. “Sebenarnya berbagai program pembelajaran pemanfaatan data sudah ada di Pusdiklat Keuangan Umum. Namun, kuotanya sangat terbatas. *Coverage*-nya juga relatif hanya untuk unit pusat. Untuk memperbesar itu, diperlukan suatu *roadshow* ke daerah-daerah,” ujar Arief Tirtana.

Pada pertengahan Februari 2022, pembahasan awal mengenai *roadshow* ini dilaksanakan. Sejak itu, serangkaian pertemuan secara virtual dilakukan, baik formal maupun informal. Setelah melalui rangkaian rapat yang melelahkan, desain program dan pembelajaran akhirnya disahkan. Pada April 2022, proyek ini diresmikan.

Seiring dengan banyaknya rapat yang diadakan, nama proyek pun disempurnakan. Program ini tidak lagi dinamakan *Data Analytics Roadshow*. Namun, berganti menjadi *Road To Data Analytics* Kemenkeu Satu atau disingkat menjadi RODAKU.

Penamaan RODAKU memiliki arti tersendiri. Tirta, panggilan akrab Arief Tirtana, mengemukakan filosofi di balik nama RODAKU. “Dari penamaan *Road To Data Analytics* Kemenkeu Satu, ada kata ‘Kemenkeu SATU’ yang memiliki makna sinergi. Kata RODA diambil karena diharapkan budaya data terus berputar, menggelinding seperti *snowball*. Yang awalnya kecil terus berputar, membesar, dan terus membesar.”

Tirta menjelaskan bahwa penamaan RODAKU merupakan hasil kesepakatan bersama dari tim CDMO. Laki-laki yang pernah bekerja di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai ini juga menambahkan, “RODAKU merupakan ikhtiar untuk menciptakan analisis-analisis data di daerah dan menjadi agen perubahan pemanfaatan data di lingkungannya.”

RODAKU bertujuan untuk meningkatkan *awareness* data pada unit daerah. Karena itu, peran unit vertikal sangat dibutuhkan. Berdasarkan *grand design* RODAKU, kegiatan ini akan diselenggarakan pada 11 Balai Diklat Keuangan (BDK atau Balai). Kesebelas Balai tersebut merupakan unit vertikal di bawah Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan (BPPK). Agar RODAKU berjalan, koordinasi dengan 11 Balai menjadi keharusan.

I Gusti Ayu Diah Cintya Utami, desainer program pembelajaran dari Pusdiklat Keuangan Umum, mengungkapkan bahwa diskusi dengan perwakilan Balai juga intens dilakukan. Kegiatan ini dilakukan dalam rangka koordinasi dan sosialisasi program RODAKU. “Rangkaian diskusi secara resmi dilaksanakan sejak April 2022,” tutur Diah, sapaan akrabnya.

Selain berkoordinasi dengan unit vertikal, diskusi dengan calon pengajar pun diperlukan. Untuk menentukan pengajar, Pusdiklat Keuangan Umum menyelenggarakan *Focus Group Discussion* (FGD) pada Mei 2022. Melalui forum ini, Pusdiklat Keuangan Umum menerima masukan dan mengidentifikasi calon pengajar yang kompeten. Mengusung budaya Kemenkeu SATU, pengajar

RODAKU diputuskan tidak hanya melibatkan pegawai pusat, tetapi juga pegawai daerah yang memiliki keahlian.

Setelah proses persiapan matang, *piloting workshop* RODAKU dilakukan. Kegiatan proyek percontohan diselenggarakan BDK Medan (25-26 Mei 2022) dan BDK Malang (30-31 Mei 2022). Acara *Kick-off* RODAKU sendiri dilaksanakan pada 7 Juni 2022 di BDK Cimahi. Melalui kegiatan *Kick-off* ini, Proyek RODAKU resmi diluncurkan. Pembukaan tersebut dilakukan langsung oleh Kepala BPPK, Andin Hadiyanto. Selain Andin, pimpinan CTO pun hadir secara daring pada acara ini.

### PERSIAPAN PENYELENGGARA DAN PESERTA WORKSHOP RODAKU

*“The best preparation for tomorrow is doing your best today.”* – H. Jackson Brown

*Workshop* RODAKU diselenggarakan oleh 11 Balai selama kurun Mei-Agustus 2022. Balai Diklat Keuangan Medan menjadi yang pertama dari rangkaian kegiatan ini. Sebagai penyelenggara pertama, tentu ada hal baru yang perlu disiapkan. Gunung Silalahi, penanggung jawab *workshop* RODAKU dari BDK Medan memaparkan, “Yang perlu kami siapkan adalah peserta. *Workshop* ini berbeda dengan pelatihan pada umumnya. Biasanya, permintaan peserta dilakukan oleh Pusdiklat. Namun, khusus untuk RODAKU, BDK yang harus melakukannya.”

Persiapan peserta ini juga diamini oleh Kharisma Rizki Mauludi, *person in charge* RODAKU dari BDK Cimahi. “Peserta pelatihan biasanya dipilih atau ditunjuk langsung oleh Pusdiklat. Sementara untuk RODAKU, kami yang harus berinisiatif untuk mencari peserta.”

Untuk menjaring peserta, Kiki, sapaan akrab dari Kharisma Rizki Mauludi menjelaskan, “Kami mengirimkan Nota Dinas kepada unit-unit kerja yang berada

di bawah naungan kami. Unit kerja tersebut berada di wilayah Jawa Barat dan Banten. Sayangnya, peserta yang mendaftar masih kurang dari target. Untuk mengatasinya, kami menghubungi setiap kantor wilayah agar membantu mengirimkan peserta.”

Balai Diklat Keuangan Manado mengalami kejadian sebaliknya. Ely Tyson Panambunan, koordinator RODAKU BDK Manado, bercerita, “Calon peserta dan unit pengembangan SDM sedari awal sudah antusias. Mereka banyak bertanya terkait program ini. Padahal saat itu BDK Manado belum mengirimkan surat permintaan peserta. Bahkan, calon peserta yang diusulkan melebihi kuota. Sementara itu, target yang harus kami penuhi adalah hanya sebanyak 60 peserta. Karena itu, kami harus melakukan ‘seleksi’ terhadap unit yang mengusulkan lebih.”

Lebih lanjut, Ely, panggilan akrabnya, menuturkan persiapan yang dilakukannya. “Karena BDK Manado melaksanakan *workshop* secara klasikal, banyak upaya yang harus disiapkan. Misalnya menyiapkan kebutuhan peserta di kelas dan kebutuhan asrama. Selain itu, kami juga harus menjelaskan administrasi perjalanan dinas kepada peserta sesuai ketentuan yang berlaku.”

Dari sisi peserta, salah satu peserta RODAKU BDK Medan, Alex, memaparkan persiapan yang dilakukannya ketika akan mengikuti *workshop* ini. “Sebelum ikut *workshop*, saya membaca materi-materi terkait *orange data science* supaya lebih gampang dimengerti saat diajarkan di kelas. Hal ini saya lakukan karena saya masih awam dengan IT.”

Selanjutnya, Alex berpesan terkait persiapan yang harus dilakukan penyelenggara kepada peserta, “Sebaiknya minimal dua minggu sebelum *workshop* dimulai, modul sudah diberikan kepada peserta. Karena topik yang dibahas cukup berat, peserta perlu waktu untuk meng-*upgrade* pengetahuannya. Terutama peserta yang tidak punya *background* IT.”

#### TANTANGAN DAN HAMBATAN

**“Everyone has challenges and lessons to learn-we wouldn’t be who we are without them”**

– Sean Comb

Tantangan merupakan bagian tidak terpisahkan dari kehidupan. Tidak ada satu pun manusia yang tidak luput menghadapinya. Tantangan akan memberikan kita bekal untuk memperbaiki diri. Dari suatu tantangan, kita akan belajar untuk menjadi lebih baik. Sebagaimana Sean Comb mengatakan, kita tidak akan menjadi kita yang sekarang, tanpa belajar dari suatu tantangan.

Pada saat mempersiapkan RODAKU, timbul beberapa tantangan yang dihadapi oleh pihak terlibat. Tirta, selaku perwakilan dari CTO menyatakan beberapa hal yang menjadi hambatan dalam mempersiapkan RODAKU. Hambatan pertama adalah desain pembelajaran. Penggagas kegiatan harus bisa mendesain materi *workshop* yang hanya dilaksanakan selama dua hari. Terlebih dengan sebaran peserta yang mayoritas masih awam akan data analitik. Hambatan yang kedua adalah banyaknya pengajar yang dibutuhkan. Jadwal *workshop* yang panjang dan berangkai, membutuhkan banyak pengajar. Tirta menambahkan, “Ketersediaan pengajar perlu ditambah dari komunitas karena beberapa kali pengajar *existing* memiliki agenda lain yang tidak bisa ditinggalkan.”

Cahya, desainer pembelajaran RODAKU, juga berpendapat sama. Tantangan yang paling mendasar baginya adalah pada saat mempersiapkan pengajar. Sama seperti yang Tirta sampaikan, Cahya memaparkan, “Beberapa pengajar batal mengajar pada hari H karena ada penugasan lain. Kami harus melakukan sedikit ‘akrobat’ terkait pengajar ini.”

Diah, desainer program RODAKU, mengemukakan tantangan yang berbeda.

Menurut Diah, kolaborasi dan koordinasi, serta identifikasi peserta merupakan tantangan yang harus dihadapi pada saat mempersiapkan RODAKU. “Program ini merupakan suatu kolaborasi, perlu ada pemaparan berulang tentang RODAKU kepada orang yang berbeda. Koordinasi dengan pihak Balai juga sangat menantang mengingat program ini merupakan proyek pertama dan belum banyak dikenal. Proses identifikasi peserta juga membutuhkan usaha lebih karena Balai yang berwenang menentukan, bukan Pusdiklat,” tutur alumnus *University of Chicago* ini.

Ketiga perwakilan dari Balai sepakat bahwa proses penentuan peserta merupakan salah satu tantangan RODAKU. Sebagaimana Gunung menjelaskan, “Sebenarnya kami memiliki waktu sekitar 2-3 minggu untuk mempersiapkan *workshop* ini. Namun, karena kami juga harus mencari peserta, timbul sedikit kendala. Banyak unit yang tidak mengirimkan peserta sesuai dengan kuota yang tersedia. Akibatnya, jumlah peserta tidak memenuhi target.”

Kiki, dari BDK Cimahi menambahkan, “Syarat yang terdapat dalam Kerangka Acuan Program (KAP) juga sedikit membingungkan. Kualifikasi peserta yang diatur dalam KAP membuat banyak unit tidak mengusulkan pegawainya. Namun, pada akhirnya persyaratan tersebut menjadi gugur. Yang datang boleh siapa pun.” Kiki berharap di masa mendatang ada pendekatan yang lebih komprehensif lagi terkait pemahaman program ini. Perlu ada penjelasan lebih teknis terkait mekanisme pemanggilan dan syarat peserta.

Cerita berbeda terjadi di BDK Manado. Ely, koordinator dari BDK Manado, mengatakan bahwa calon peserta bersemangat untuk ikut RODAKU. “Sayangnya,” kata Ely menambahkan, “Sebagian dari enam puluh peserta yang kami panggil ternyata tidak bisa hadir. Mereka tidak bisa datang karena berbagai kendala. Setelah kami telusuri, pengelola SDM dari setiap unit kerja ternyata

tidak mengomunikasikan lebih jelas terkait teknis RODAKU. Pada akhirnya beberapa peserta tidak dapat mengikuti *workshop* ini.”

#### LESSON LEARNED

**“Continuous improvement is better than delayed perfection” – Mark Twain**

Berdasarkan tantangan di atas, banyak hal yang bisa kita pelajari. Pelajaran tersebut tentunya sebagai ruang perbaikan di masa mendatang. Sebagaimana Tirta menyampaikan, “Selalu ada *room of improvement*, baik dari sisi materi maupun dari sisi sinergi.”

Koordinasi antara unit perlu ditingkatkan lagi. Beberapa *workshop* tidak berjalan maksimal karena kurangnya koordinasi. Seperti yang terjadi pada BDK Cimahi atau di BDK Manado. Perlu koordinasi yang efektif agar RODAKU di masa mendatang bisa terlaksana dengan lebih baik lagi.

Waktu merupakan tantangan lain yang perlu diatasi. Perwakilan Balai berharap jika RODAKU akan diadakan kembali, mereka diberi waktu yang mencukupi. Terutama dalam hal proses identifikasi. Waktu pelaksanaan *workshop* juga mungkin perlu dikaji kembali. Hal ini untuk memastikan agar materi bisa tersampaikan dengan lebih baik lagi.

Seluruh unit yang terlibat perlu lebih bersinergi. Termasuk pada saat pelaksanaan RODAKU itu sendiri. Ely, dari BDK Manado, memaparkan bahwa waktu pelaksanaan RODAKU harus dikoordinasikan agar tidak dilakukan bersamaan dengan agenda besar unit Kementerian Keuangan lainnya.

Ely juga menyampaikan bahwa pelaksanaan RODAKU secara klasikal perlu direvisi kembali. Menurutnya, jam pelatihan *workshop* yang diampu tidak sebanding dengan biaya yang dikeluarkan

untuk mendatangkan peserta. Hal ini terjadi karena rerata peserta *workshop* BDK Manado harus menggunakan pesawat untuk menghadiri acara ini.

Diah menyampaikan bahwa pada awal perjalanan RODAKU, target peserta di beberapa Balai tidak terpenuhi. Hal ini bukan karena kurangnya antusiasme peserta, tapi lebih karena kurangnya waktu untuk mensosialisasikan kegiatan ini. “Pada perjalanannya, sebenarnya banyak sekali peserta yang tertarik dengan program ini. Semua itu butuh waktu, baik untuk mengenalkan program maupun untuk mendapatkan peserta,” kata Diah. Karena itu, sosialisasi RODAKU di masa mendatang perlu lebih ditingkatkan kembali.

Sebagai penutup, Tirta menyampaikan, “Menumbuhkan budaya data organisasi adalah suatu perjalanan yang tidak singkat. Pimpinan tertinggi di Kementerian Keuangan terus mendorong agar terciptanya *data-driven organization*. Data adalah sumber daya yang berharga. Mendiampkannya sama dengan pemborosan sumber daya lainnya.”

Konsep *data-driven organization* terlihat sederhana, namun praktiknya perlu banyak upaya. Untuk mencapai tujuan itu, organisasi harus membentuk budaya data. Budaya tersebut tidak hanya mengubah pola pikir, namun juga budaya kerja. Budaya itu harus mengalir di setiap lapisan. Tidak hanya mengalir pada jajaran pimpinan belaka, namun juga pelaksana.

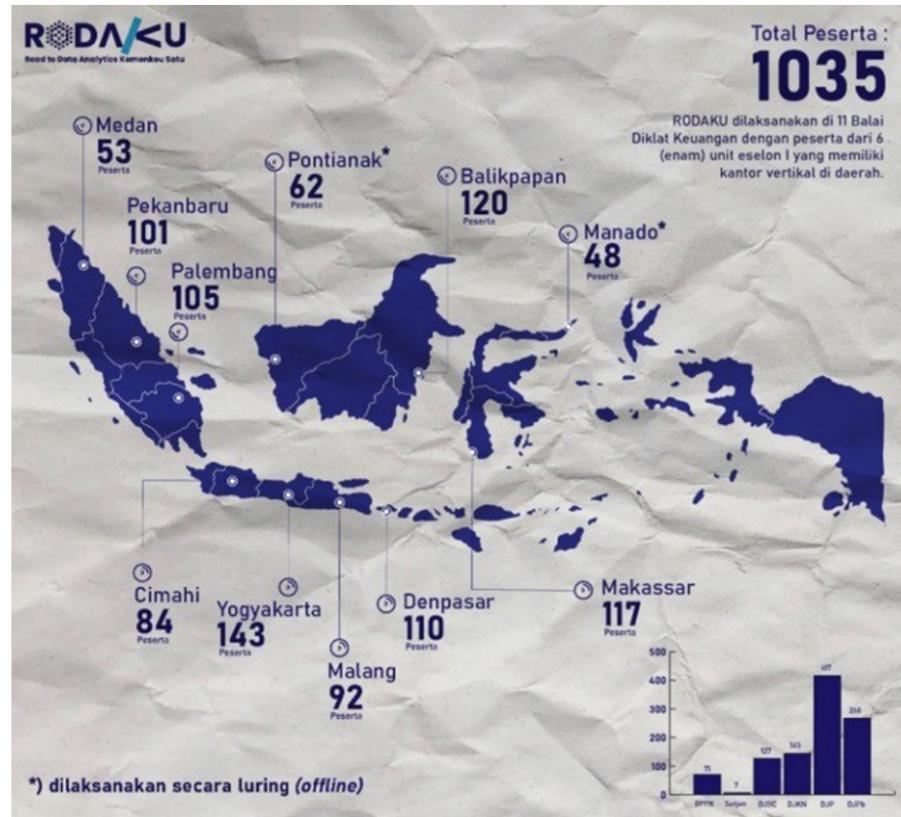


**“Data can be the lifeblood of an organization if it is allowed to flow freely across the entire ecosystem,”**

– Herman Heyns.

HERINA NURHAYATI

# RODAKU: RODA YANG TERUS BERGULIR



INFOGRAFIS: CTO

Seperti roda yang terus bergulir. Itulah harapan yang disematkan pada penyelenggaraan *event* Workshop *Road to Data Analytics* Kementerian Keuangan atau yang biasa disingkat RODAKU.

“Sesuai dengan namanya, RODAKU, saya berharap (manfaat dari kegiatan) ini terus menggelinding, terus berjalan ke depan, terus semakin besar seperti bola salju, sehingga dapat menumbuhkan budaya pemanfaatan data di setiap lini Kementerian Keuangan,” kata Oza Olavia saat secara resmi membuka kegiatan dan memberikan ceramah terkait isu terkini *data analytics* pada penyelenggaraan RODAKU di Balai Diklat Keuangan (BDK) Medan. Lebih lanjut, Staf Ahli Bidang Penerimaan Negara, Kementerian Keuangan, ini mengatakan penyelenggaraan RODAKU merupakan amanah dari pimpinan Kementerian Keuangan agar setiap lini di kementerian ini bisa menjadikan *data analytics* sebagai bagian dari pekerjaan sehari-hari.

Pagelaran *workshop* ini merupakan hasil kolaborasi antara *Central Transformation Office* (CTO) Sekretariat Jenderal

Kementerian Keuangan dengan Pusat Pendidikan dan Pelatihan (Pusdiklat) Keuangan Umum dan 11 BDK di seluruh wilayah Indonesia. Dalam pelaksanaannya, eselon I lain juga turut dilibatkan, baik sebagai pengajar maupun sebagai peserta.

Menteri Keuangan RI, Sri Mulyani Indrawati mengatakan bahwa data merupakan “tambang” baru. Tambang baru ini tentunya perlu digali oleh seluruh pegawai, baik yang berada di unit pusat maupun yang berada pada unit-unit vertikal di daerah. Justru, pegawai yang berada pada unit vertikal mungkin memiliki peran yang lebih besar terkait data. Mengingat data yang ada di unit pusat juga sebagian besar berasal dari unit-unit vertikal di daerah.

*Garbage in garbage out*. Apabila data yang masuk masih belum baik, maka *output* yang dihasilkan juga akan sulit untuk maksimal. Oleh sebab itu, peningkatan *awareness* pegawai di unit vertikal menjadi suatu hal yang krusial agar ada rasa memiliki terhadap data. Kesadaran untuk bersama memiliki dan bertanggung jawab terhadap data merupakan suatu hal yang penting untuk ditumbuhkan pada diri setiap pegawai, tanpa memandang asal kantor pegawai tersebut.

Hal inilah yang dirasakan masih kurang terasa gaungnya pada Kementerian Keuangan. Anggapan bahwa data hanya milik kantor pusat masih sangat terasa. Salah satu buktinya adalah masih rendahnya persepsi pegawai mengenai data, sebagaimana yang ditunjukkan melalui hasil Survei Budaya Data Kementerian Keuangan Tahun 2022.

Pada survei tersebut, budaya data di Kementerian Keuangan ternyata baru mendapatkan nilai 3,75 dari skala 5. Secara spesifik, dimensi literasi hanya mendapatkan nilai 3,54 dan dimensi komunikasi hanya mendapatkan nilai 3,68. Dari 11 unit eselon I yang berada di bawah Kementerian Keuangan, tidak ada satu pun unit eselon I yang memiliki skor budaya data secara agregat di atas 4.

Hampir seluruh responden (sebanyak 95,4%) sepakat bahwa pemanfaatan data harus menjadi bagian penting dari strategi organisasi, namun ketika bicara mengenai pemenuhan kebutuhan pengembangan kompetensi terkait data, hampir seluruh responden (97,1%) mengakui bahwa pemenuhan kebutuhan pengembangan kompetensi data analitik masih belum dilakukan secara berkelanjutan dan komprehensif.

Hasil survei ini menjadi pemecut bagi Kementerian Keuangan untuk menggalakkan kegiatan-kegiatan pengembangan kompetensi terkait data. Terlebih mengingat *data analytics projects* merupakan bagian dari isu sentral inisiatif strategis Kementerian Keuangan tahun 2022.

Untuk itulah, *Workshop* RODAKU hadir sebagai salah satu upaya pengembangan kompetensi terkait data. Kegiatan ini diselenggarakan secara daring di 9 lokasi BDK dan secara luring di 2 lokasi BDK, yaitu BDK Manado dan BDK Pontianak.

Pengusungan BDK sebagai lokasi kegiatan *workshop* dilakukan agar dapat menjangkau unit-unit vertikal Kementerian Keuangan yang tersebar dari Sabang sampai Merauke. Harapannya tentu agar tujuan dari kegiatan ini dapat tercapai, yaitu meningkatkan *awareness* pegawai Kementerian Keuangan terhadap pentingnya data, utamanya pegawai yang berada pada unit vertikal.

Agar harapan tersebut dapat tercapai dan peserta yang terjaring benar-benar yang sesuai dengan kriteria, peran BDK pada penyelenggaraan RODAKU ini lebih ditingkatkan dibandingkan penyelenggaraan kegiatan pembelajaran lain pada umumnya. Jika biasanya peserta pembelajaran lebih bersifat *top-down*, dimana BDK tinggal menyelenggarakan kegiatan yang pesertanya sudah diberikan dari pusat; pada penyelenggaraan RODAKU ini sifatnya lebih *bottom-up*, dimana BDK mencari peserta sendiri dengan berkoordinasi intens dengan unit-unit kantor vertikal di daerah. Hal ini dirasa cukup *challenging*, karena

merupakan suatu hal yang baru. Koordinasi intens antara unit pusat dan daerah, mutlak diperlukan agar tidak terjadi miskomunikasi dan kegiatan dapat berjalan dengan lancar.

Sejumlah 1.036 peserta telah mengikuti kegiatan yang dilangsungkan dalam kurun waktu Mei sampai dengan Agustus 2022 ini. Peserta tersebut berasal dari 6 (enam) unit eselon I yang memiliki kantor vertikal di daerah, yaitu Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan (BPPK), Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan RI (Setjen), Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC), Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN), Direktorat Jenderal Pajak (DJP), dan Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb). Bersama-sama, mereka belajar mengenai pengenalan *data analytics* dan *showcase*, *Excel for Data Analytics*, *Praktik Orange Data Mining*, dan *Simulations Data Modeling and Competition*.

Peserta dari berbagai rentang usia menjadi satu dalam ruang pembelajaran RODAKU. Inilah tujuan lain dari kegiatan ini, menanamkan kesadaran bahwa data bukan hanya milik generasi tertentu saja. Data adalah milik semua, bahkan yang sudah tidak bernyawa. *Wisdom* yang dimiliki oleh generasi X atau *baby boomer* yang telah banyak merasakan asam garam kehidupan, sangat penting dan dibutuhkan dalam melukis kisah data itu sendiri.

Maka, bergabunglah pegawai-pegawai punggawa data, baik yang murni karena didorong rasa ketertarikan terhadap data maupun mereka yang awalnya sekadar memenuhi penugasan semata.

“(Mengikuti RODAKU merupakan) keinginan saya sendiri, karena penasaran dengan perkembangan *data analytic* saat ini”, kata Daniel, salah satu peserta RODAKU di BDK Medan.

Lain Daniel, lain pula Ashila dan Okky, yang mengaku mengikuti RODAKU awalnya karena ditugaskan. Namun, mereka semua satu suara bahwa penyelenggaraan RODAKU sangat seru dan bermanfaat.

“Seru kak, pematerinya juga baik banget mau ditanyain kalau ada yang bingung. Bisa menambah *skill* mengolah data untuk pekerjaan sehari-hari juga”, kesan Ashila, peserta RODAKU di BDK Cimahi.

Senada dengan Ashila, Okky, peserta RODAKU di BDK Pontianak, turut mengamini bahwa penyelenggaraan RODAKU bermanfaat bagi dirinya. Pegawai yang berasal dari Kantor Wilayah DJP Kalimantan Barat ini mengaku bahwa dirinya merasa terbantu dalam melakukan pengolahan data untuk melakukan pekerjaan sehari-hari usai mengikuti RODAKU. Meskipun tidak menggunakan aplikasi yang sama seperti yang diajarkan saat *workshop*, namun lelaki berusia 30 tahun tersebut dapat mengadopsi cara kerja yang dicontohkan, sehingga pekerjaan pun menjadi lebih efisien.

Manfaat positif inilah yang mungkin menjadi salah satu faktor terciptanya atmosfer positif selama kegiatan RODAKU.

“Animo peserta sangat positif. Para peserta antusias, bahkan merasa waktu kegiatan kurang panjang karena kegiatannya dinilai sangat bermanfaat. Peserta terbaik juga senang karena mendapat undangan ke Jakarta oleh CTO,” kata Dewi, salah satu panitia RODAKU BDK Pontianak.

Ya, peserta pemenang kompetisi data di setiap BDK memang mendapatkan hadiah berupa Pelatihan *Design Sprint* yang diselenggarakan di Jakarta. Pelatihan yang telah diselenggarakan pada September yang lalu ini merupakan *award* bagi mereka yang telah bersungguh-sungguh dan ingin terus belajar terkait data.

Rangkaian kegiatan RODAKU ditutup manis dengan penyelenggaraan secara luring di BDK Pontianak. Diakhiri dengan sesi pemotongan tumpeng sebagai simbol harapan hidup lebih baik, tertitip asa bahwa *data analytics* Kementerian Keuangan akan terus lebih baik kedepannya.

Meskipun RODAKU 2022 sudah berakhir, guliran roda *data analytics* Kementerian Keuangan akan terus berjalan. Ini baru permulaan. Roda ini diharapkan terus menggelincir. Macet dan aus itu biasa. Asalkan terus melintas, menelusuri jalan yang terbentang panjang.

**KEGIATAN RODAKU DI BDK PONTIANAK (LURING/ OFFLINE)**



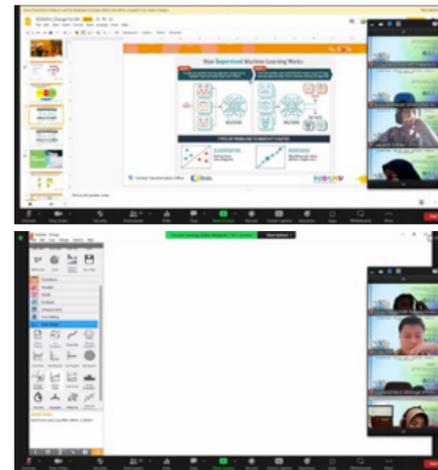
Credit: BDK Pontianak

**KEGIATAN RODAKU DI BDK MANADO (LURING/ OFFLINE)**



Credit: BDK Manado

**KEGIATAN RODAKU DI BDK MEDAN (DARING/ ONLINE)**



Credit: BDK Medan

**SUASANA PENUTUPAN KEGIATAN RODAKU DI BDK PONTIANAK**



Credit: M. Reza Nursaid, BDK Pontianak

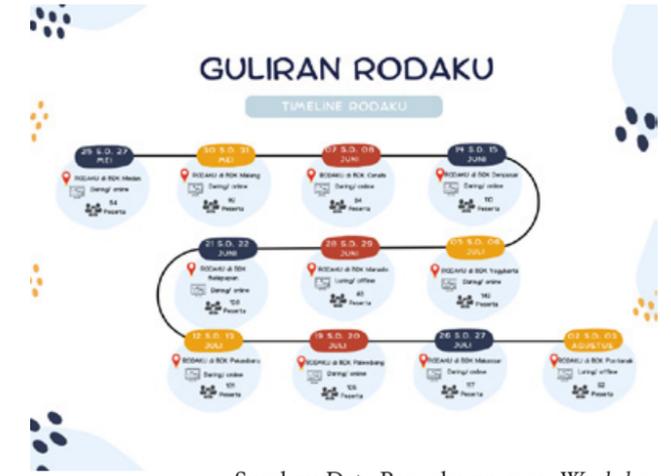
**INFOGRAFIS PENYELENGGARAAN RODAKU**



Credit: CTO



Sumber: Data Penyelenggaraan Workshop RODAKU, Pusdiklat Keuangan Umum



Sumber: Data Penyelenggaraan Workshop RODAKU, Pusdiklat Keuangan Umum

**PESAN MEREKA UNTUK RODAKU**

**Ashila Sisti Rahmaningtyas** Jadi makin tertarik terkait *data analytics*. Kalau ada *workshop* lanjutan, mungkin akan sangat berguna. Kedepannya bisa diadakan secara luring biar penyampaian materi dan praktik bisa maksimal.

**Pecinta Data yang Memilih untuk Tidak Disebutkan Namanya** Materinya terlalu padat, sedangkan waktunya sebentar. Berhubung kompetensi peserta tidak merata, *pace* kegiatannya harus mengorbankan sisi yang lain. Akan oke kalau pengajar lebih proaktif mengajukan pertanyaan ke peserta yang belum paham. Kompetisi sangat menarik. Tapi, perlu divariasikan lagi studi *case*-nya di tiap tempat penyelenggaraan.

**Daniel Sianturi** Materi RODAKU menarik, tapi belum puas karena waktu penyelenggaraannya sangat singkat.

**Okky Ardian Wiranata** Kalau penyelenggaraannya kemarin menurut saya, baiknya pesertanya memang yang sudah paham terkait analisis data, karena kemarin pengajarnya termasuk sangat cepat dalam mengajarkan. Jadi untuk peserta yang benar-benar awam akan sulit mengikuti. Atau bisa juga diperpanjang jangka waktu kegiatannya. Sarannya, sering-sering diadakan *workshop* sejenis lagi, dan tentunya pesertanya lintas eselon I.



ANDITA TRIAS NUR AZIZAH

## EXECUTIVE TRAINING FOR THE WINNERS

Pusdiklat Kepemimpinan dan Manajerial (Pusdiklat KM), secara rutin menyelenggarakan kegiatan *Executive Training for The Winners* sebagai salah satu bentuk reward dan pengembangan kompetensi bagi para Pejabat Administrator/ setingkat perwakilan kantor pemenang baik yang mendapatkan peringkat Kantor Wilayah Terbaik (KWT), Kantor Pelayan Terbaik (KPT), Wilayah Birokrasi

Bersih dan Melayani (WBBM), Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Evaluasi Unit Pelayanan Publik (EUPP). Selain bertujuan sebagai reward, program ini juga bertujuan untuk dapat memberikan penyegaran dan penguatan kompetensi leadership dan managerial bagi para Pejabat Administrator/ setingkat sekaligus media untuk *sharing session* diantara para peserta.

Dalam menghadapi perkembangan zaman yang semakin cepat, seorang pemimpin harus memiliki kecerdasan dan inisiatif yang konsisten dalam menghadapi tantangan dan hambatan dalam pencapaian visi dan misi organisasi. Seorang pemimpin harus memiliki tiga elemen kepemimpinan agar dapat optimal dalam menjalankan tugas sebagai pemimpin, *skills*, ketekunan dalam berlatih dan *mindset* merupakan tiga

elemen penting yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin. Untuk memenuhi konsep tersebut dipilihlah tema *Building Agility for Innovative Leadership* untuk kegiatan *Executive Training for The Winners T.A 2022* ini.

*Executive Training for The Winners* ini memiliki metode yang berbeda dalam *delivery/* pemberian materinya. Narasumber yang dihadirkan pun sangat kompeten dan dapat memberikan insight baru kepada para peserta. Dalam pelaksanaannya, pendekatan kegiatan yang dilakukan adalah dengan *debrief framework* yaitu 4F (*Facts, Feelings, Finding, Furute*). Dalam praktiknya, kegiatan ini menggabungkan kegiatan outbond, materi dalam kelas serta mempelajari kearifan budaya lokal untuk mendapatkan benang merah inti dari pembelajaran. Terdapat berbagai macam tantangan yang harus dipecahkan oleh peserta baik dalam bentuk individual ataupun kelompok sehingga suasana kelas terbangun

dengan baik dan para peserta secara tidak langsung dapat lebih dekat dengan peserta lain.

Narasumber yang dihadirkan untuk kegiatan ini antara lain Bp. Fanny Winara (*certified facilitator*) dan Tomy Sudjarwadi (*master facilitator, chief technical officer*) dari Tim Dunamis, Bp. Rionald Silaban (Direktur Jenderal Kekayaan Negara), Ibu Ari Wahuni (Kepala Biro Organisasi dan Tatalaksana, Sekretariat Jenderal) dan Bp. Wahyu Kusuma Romadhoni (Kepala Pusdiklat Kepemimpinan dan Manajerial) serta Bp. Heru Pambudi (Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan). Kegiatan ini dilaksanakan di Kota Bogor, Jawa Barat pada tanggal 6-8 September 2020 dan diikuti oleh 30 (tiga puluh) Pejabat Administrator/fungsional setara perwakilan dari kantor-kantor pemenang di lingkungan Kementerian Keuangan. Detil peserta yang mengikuti dapat dilihat dalam table berikut:

UE I	LOKASI		Total
	Daerah	Pusat	
SETJEN		1	1
DJA		1	1
DJP	3	3	6
DJBC	4	2	6
DJPB	5	2	7
DJKN	6	1	7
DJPPR		1	1
BPPK		1	1
<b>Total</b>	<b>18</b>	<b>12</b>	<b>30</b>

Tabel 1.1 Jumlah peserta berdasar UE I

Kategori Pemenang	Jumlah
EUPP KemenPAN RB	1
Kantor Pelayanan Terbaik	11
Kantor Wilayah Terbaik	4
Wilayah Bebas Bersih Melayani	6
Wilayah Bebas Korupsi	8
<b>Total</b>	<b>30</b>

Tabel 1.2 Jumlah peserta berdasar kategori pemenangan

Pemilihan tema *Building Agility for Innovative Leadership* ini tidak lepas dari semangat berinovasi dalam mewujudkan sinergi, pelayanan dan kesempurnaan kepada stakeholder dan Kemenkeu Satu Kewilayahan yang saat ini sedang kita gelorakan bersama. Para pejabat administrator berasal dari berbagai lintas daerah yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia merupakan representasi Kemenkeu Satu tanpa sekat-sekat antar unit dan selalu bersinergi membangun negeri serta menjaga nasionalisme. Sinergi antar pimpinan yang kita bangun ini diharapkan dapat turut serta dalam membangun dan memastikan hubungan kerjasama internal yang produktif serta kemitraan yang harmonis dengan para pemangku kepentingan, untuk menghasilkan karya yang bermanfaat dan berkualitas.

Kegiatan *Executive Training* ini dibuka oleh Kepala Pusdiklat Kepemimpinan dan Manajerial, Bp. Wahyu Kusuma Romadhoni. Dalam pembukaan kegiatan, Bp. Dhoni berpesan bahwa para pemimpin harus dapat menjadi agen perubahan, memiliki inovasi untuk terus bertumbuh dan memberikan pelayanan yang terbaik. Setelah itu, peserta berkesempatan untuk beraudiensi dengan Ibu Ari Wahyuni terkait *current issue*, manajemen tim dan *leadership* di Kementerian Keuangan. Di hari pertama, para peserta diberikan materi terkait pola framework kepemimpinan inovatif yang terdiri atas pola piker bertumbuh, identifikasi perubahan kebutuhan, menelusuri ide bersama tim dan mengembangkan solusi oleh fasilitator dari PT Dunamis yaitu Bp. Fanny Winara. Di hari pertama ini, pembelajaran dilakukan dengan aktif, praktik dan studi kasus di dalam kelas.

Pembelajaran di hari kedua, peserta tidak hanya belajar di dalam kelas tetapi juga melakukan kegiatan *outbond* yang bisa membangun kedekatan dan chemistry antar peserta. Untuk mengawali kegiatan di hari kedua ini, peserta diajak untuk *benchmarking* dan visitasi ke Kantor Satelit yang ada di KPPN Bogor. Selain itu, peserta juga berkesempatan untuk

menyampaikan aspirasi, diskusi dan berpendapat dengan Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan, Bp. Heru Pambudi. Tidak hanya itu saja, setelah itu peserta bergerak untuk memulai kegiatan outbond yang berlokasi di Kebun Raya Bogor dan belajar tentang budaya lokal di Bogor di Kampung Budaya Sindang Barang. Dalam kegiatan ini, para peserta didampingi oleh fasilitator yang profesional yaitu Bp. Iwang dan Tim dari PT Dunamis.

Di hari ketiga pelatihan, para peserta akan mendapatkan sesi wrap up, diskusi dan final challenge dari para fasilitator. Dalam final challenge ini para peserta diajak untuk menggali pengalaman dari kegiatan yang telah dilaksanakan di dua hari sebelumnya (*experiential learning*). Disini para peserta merangkum dan berbagi pelajaran baik dari masing-masing tim maupun dengan tim lainnya sehingga terjadi transfer learning dari para peserta satu ke peserta lain. Kegiatan outbond dalam kelas juga masih dilaksanakan dalam rangka membangun kekompakan dalam kelas.

Kegiatan *sharing* dan audiensi di hari ketiga ini diisi oleh Bp. Rionald Silaban dan By. Tommy Sudjarwadi. Kegiatan *sharing* sesi pertama diisi oleh Bp. Tomy Sudjarwadi yang membagikan pengalamannya dalam ranah *leadership in private sector*. Bagaimana seorang leader dapat terus tumbuh dan berkembang dalam menghadapi perubahan, membangun motivasi dalam tim dan dapat bertahan dalam gerusan perubahan yang semakin pesat. Di *sharing session* sesi kedua, diisi oleh Bp. Rionald Silaban (Direktur Jenderal Kekayaan Negara), para peserta diajak untuk berdiskusi dan berpendapat tentang inovasi, motivasi dan semangat yang harus tetap dipelihara dalam menjadi seorang pemimpin. Sebagai seorang pemimpin tentunya harus bersikap *agile*, mampu beradaptasi dan memberikan inovasi dalam memperbaiki masalah yang dihadapi.

Setelah tiga hari mengikuti kegiatan *Executive Training for The Winners Building Agility for Innovative Leadership* ini, diharapkan para peserta dapat membangun *growth mindset* dan

*agility* para pemimpin, memahami tantangan perubahan yang terjadi saat ini, membangun sinergi dalam tim serta menerapkan ide dan inovasi bersama tim dan bagaimana menjalankan peran sebagai wajah Kementerian Keuangan di daerah.

*Dalam pelaksanaannya, pendekatan kegiatan yang dilakukan adalah dengan debrief framework yaitu 4F (Facts, Feelings, Finding, Furute).*

FOTO :  
DOK. PUSDIKLAT KEPEMIMPINAN DAN MANAJERIAL

FOTO :  
DOK. PUSDIKLAT KEPEMIMPINAN DAN MANAJERIAL



SATRIA AJI SETIAWAN  
IMMANUEL CHRISTIAN TAMBUNAN

# HENI KARTIKAWATI



**P**usdiklat Keuangan Umum meraih penghargaan dari Menteri Keuangan sebagai Nagara Dana Abyakta bidang Penguatan Budaya Data. Penghargaan ini didapatkan karena Pusdiklat Keuangan Umum dinilai telah mendukung terciptanya budaya data di lingkungan Kementerian Keuangan melalui komunikasi dan mengamplifikasi budaya data, menyediakan fasilitas pengembangan kompetensi di bidang analisis data, menciptakan literasi data, mendorong terwujudnya kolaborasi pemanfaatan data, dan mewujudkan ekosistem terkait *data-driven* di lingkungan Kementerian Keuangan. Penghargaan yang didapat oleh Pusdiklat Keuangan Umum ini tentu tidak terlepas dari peran Kepala Pusdiklat Keuangan Umum, Heni Kartikawati.

Heni, begitu ia kerap disapa, diamanahkan untuk memimpin Pusdiklat Keuangan Umum sejak 21 November 2018. Menjadi pejabat eselon II tidak lantas membuat sifatnya berubah dan menjaga jarak dari para pegawainya. Heni tetap menjadi sosok yang egaliter dan tidak berjarak dengan para pegawainya. Heni Kartikawati, perempuan kelahiran Yogyakarta, 52 tahun silam merupakan seorang introvert. Bagi Sebagian orang, mungkin pemimpin yang ideal tidak seharusnya bersifat introvert. Namun, Susan Cain dalam eksplorasi mendalamnya yang dituangkan di bukunya yang berjudul *Quiet, The Power of Introverts in a World That Can't Stop Talking* menemukan hal yang sebaliknya. Banyak pemimpin efektif di dunia ini adalah orang yang introvert. Orang yang introvert cenderung lebih kreatif karena kelebihan mereka dalam berkontemplasi dan mampu mentransformasikan dirinya menjadi pribadi yang lebih baik karena kemampuan observasinya yang lebih kuat dibandingkan ekstrovert. Tak berlebihan kiranya jika Heni adalah salah satu pemimpin introvert yang efektif seperti Charles Schwab, Bill Gates, dan Lou Gerstner.



## AVID LEARNER

Heni merupakan seorang *avid learner* yang mampu belajar dan memetakan sumber pembelajaran dengan baik. Dia gemar membaca buku dan belajar melalui akun di media sosial tentang kepemimpinan, manajerial, dan psikologi. Gelar sarjana psikologi Heni dapatkan pada tahun 1995 dari Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. Setahun setelah memperoleh gelar sarjana, Heni memilih untuk bergabung menjadi PNS di Kementerian Keuangan. Selang tiga tahun bekerja di Kementerian Keuangan, dengan keinginan besar untuk menambah pengetahuannya, Heni melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi di Nagoya University dan meraih gelar Master of International Development and Cooperation pada tahun 2002.

Ketika ditanyakan hal yang mendorongnya untuk belajar lebih banyak lagi, Heni mengenang momen pada tahun 2008 ketika ia baru saja menjabat sebagai Kepala Bagian Organisasi dan Tata Laksana (OTL). “Hal yang menjadi pemicu utama untuk lebih banyak belajar adalah ketika menjabat sebagai Kabag OTL karena sifat pekerjaan Kabag OTL yang harus menangani pekerjaan yang beragam dan relatif baru, terutama karena di tahun 2008 tersebut sedang dimulai reformasi birokrasi Kementerian Keuangan.” kenang Heni. “Peran saya sebagai Kabag OTL menjadikan saya untuk terekspos dengan rapat-rapat yang penting dan

orang-orang yang menduduki jabatan strategis, sehingga saya punya kesempatan juga untuk belajar dari mereka.” Tambahnya. Menurut Heni, posisinya sebagai Kabag OTL memacunya untuk terus belajar agar dapat memahami apa yang disampaikan oleh para pimpinan, meningkatkan kepercayaan dirinya dalam menyampaikan gagasan, dan memberikan ide untuk memberikan hal baru terkait dengan reformasi birokrasi.

Merujuk pada buku *range* yang ditulis David Epstein, Heni memiliki rentang pengetahuan yang lebar. Berbekal pendidikan psikologi, bekerja di bidang pembelajaran, dan melanjutkan pendidikan di bidang ekonomi tentu menjadikan Heni orang yang dapat melihat suatu permasalahan dari multidimensi dan interdisiplin sehingga memperkecil *blindspot* dari pandangannya.

## SELALU MENDORONG INOVASI

Memulai kariernya sebagai PNS Kementerian Keuangan sejak 26 tahun yang lalu, Heni tidak pernah ingin mengerjakan sesuatu pekerjaan dengan biasa saja. Ia selalu mendorong dirinya dan mendorong orang di sekitarnya untuk melakukan *extra mile* untuk memberikan perbaikan bagi pekerjaan mereka. “Sejak saya diangkat sebagai Kabag OTL di tahun 2008, saya melihat bahwa inovasi itu sangat penting. Meskipun pada saat itu saya tidak pernah menyebut kata motivasi, tapi saya selalu sampaikan agar Bagian OTL ini selalu melakukan perbaikan dalam proses kerjanya” jabar Heni. Pernyataan tersebut rasanya tidak berlebihan jika dilihat dari sepak terjang beliau selama ini. Selama menjadi Kabag OTL, Heni banyak menghasilkan banyak kebijakan yang signifikan bagi perubahan BPPK, diantaranya pengembangan organisasi, termasuk kelembagaan PKN STAN, peletakan dasar pengukuran kinerja dan pengelolaan risiko, perumusan proses bisnis dan *series* pedoman kediklatan, kajian akademis, dan pembangunan uji mutu proses bisnis kediklatan melalui ISO 2001:9008.



Setelah dimutasi menjadi Kabag Kepegawaian cum Plt. Sekretaris BPPK pun Ia memberikan torehan yang monumental melalui strategi Kemenkeu Corpu. Heni memulai dengan mengembangkan kapasitas pegawai dengan memfasilitasi *benchmarking* dan *workshop*. Melalui proses pembelajaran yang panjang tersebut, disusunlah konsep *blueprint* yang menjadi cikal bakal terbentuknya strategi Kemenkeu Corpu yang kini banyak menjadi bahan patok banding dari unit organisasi lain.

Pun di posisinya saat ini, Heni terus mengamplifikasi inovasi di Pusdiklat Keuangan Umum dan melembagakannya melalui program rutin bertema Barbeque atau Bahagia Berinovasi Bersama Pusdiklat KU. Hasil inovasi yang ditelurkan Pusdiklat ini pun cukup banyak, yaitu *dashboard* evaluasi pengajar (evajar) dan evaluasi penyelenggaraan pelatihan (evagara) yang kemudian dijadikan *benchmark* dalam menyusun *dashboard* di level BPPK. Inovasi lain yang lingkupnya lebih besar adalah pembelajaran terintegrasi yang di-*launching* oleh Menteri Keuangan pada tanggal 3 November 2022 lalu.

#### MENJAGA SIKAP POSITIF DI LINGKUNGAN KERJA

Heni merupakan seorang yang bersikap positif dan mampu untuk menularkan sikap positifnya di lingkungan kerja. Ketika ditanyakan bagaimana caranya untuk selalu bersikap positif, Heni menyampaikan dengan bijak bahwa “manusia itu tidak mungkin terlepas dari masalah, tapi kita harus bisa memilah dimana masalah harus ditunjukkan. Permasalahan di rumah cukup dibahas dan ditinggal di rumah, masalah di pekerjaan bisa dibicarakan di kantor.” Menurut Heni, menjaga sikap positif adalah bagian yang melekat dari sikap pimpinan dan harus dimiliki oleh para pemimpin. Beliau meyakini bahwa hal mendasar yang diperlukan bagi para pegawai adalah kenyamanan lingkungan kerja dan pimpinan memiliki kewajiban untuk menciptakan suasana yang nyaman.

Heni mendorong pegawai untuk terus berpikir untuk melakukan pekerjaan dengan lebih baik dan menciptakan inovasi. Beliau menyadari bahwa tantangan tersebut tentunya akan menjadi beban pikiran bagi para pegawainya. Oleh karena itu pemimpin harus

mampu mendorong pegawainya untuk menciptakan inovasi, namun tidak resisten. Hal ini tentunya tidak mudah, dan sikap positif pimpinan dalam meng-*encourage* bawahannya menjadi suatu hal yang mutlak.

#### JATUH CINTA DENGAN DATA

Sejak terminologi *data analytics* meluas seperti akhir-akhir ini, Heni sudah menaruh perhatian terhadap data. Sejak di Kepala Bagian OTL, Heni melihat bahwa hasil evaluasi pelatihan kurang optimal dan tidak dapat dijadikan masukan proses perbaikan dalam perencanaan dan pengembangan pelatihan. Heni mendorong agar data yang ada dianalisis terlebih dahulu agar dapat menjadi rekomendasi bagi perbaikan dalam perencanaan dan pengembangan pelatihan. “Data nya jadi lebih bunyi, sehingga hasil evaluasi tadi bisa dimanfaatkan menjadi input perencanaan.”, ujar Heni. Lebih lanjut lagi, beliau mengaitkan kebijakan berbasis analisis data (riset) ini berpengaruh pada perwujudan *Key Performance Indicator* pegawai yang seharusnya tidak boleh mengawang-awang lagi.

Ketika menjabat sebagai Kepala Pusdiklat, Heni lebih banyak terpapar dengan data. Saat memperoleh data evaluasi pelatihan, Heni merasa bahwa sulit untuk mengamati dan membandingkan hasil evaluasi pelatihan yang disajikan. Kemudian, Ia meminta beberapa pegawainya yang memiliki kompetensi di bidang IT untuk menyusun *dashboard* yang dapat menampilkan data evaluasi pengajar dan penyelenggaraan pelatihan sehingga terciptalah evajar dan evagara. “Dengan aplikasi itu, saya jadi bisa memperoleh banyak hal yang tidak akan bisa saya peroleh jika data itu disampaikan ke saya manual. Sejak itu saya jadi ketagihan, inginnya semua dipermudah dengan cara seperti itu”, ujar Heni.

#### ROAD TO RODAKU

RODAKU bukanlah pelatihan *data analytics* pertama yang diselenggarakan Pusdiklat Keuangan Umum. “Pelatihan *data analytics* pertama diselenggarakan di tahun 2019, beberapa tahun setelah saya menjadi Kapusdiklat. *Stakeholder* pertamanya saat itu adalah Itjen.” kenangnya. Evaluasi atas angkatan pertama ini pun dilakukan dari berbagai segi, antara lain desain pembelajaran (kurangnya waktu pelatihan dan ujian), pengajar, dan penyelenggaraan. Bermodalkan perbaikan sebelumnya, angkatan kedua pun dieksekusi dengan mulus.

Berkaca pada kesuksesan program pelatihan tersebut di 2019, Heni bersama dengan para *stakeholder* pun meyakini bahwa program pelatihan ini perlu dilanjutkan di tahun 2020. Sayangnya, pandemi covid-19 datang tak diundang sehingga angkatan pertama di tahun 2020 yang masih berjalan *action learning*-nya dengan sisa waktu 2 hari, mau tidak mau harus ditutup sesuai instruksi pemerintah terkait *physical distancing*. Akibatnya, adaptasi yang cukup signifikan pada proses konversi model pembelajaran menjadi pelatihan jarak jauh (PJJ) membuat Heni beserta jajaran harus bekerja ekstra untuk memastikan kualitas program pelatihan klasikal khususnya

*data analytics* tadi tetap berlangsung secara daring. Kombinasi gangguan fokus belajar (*double* penugasan pelatihan dan kerjaan kantor) dan kebaruan ilmu *data analytics* menjadi tantangan tersendiri yang harus dihadapi.

Pada tahun itu beberapa pihak menyangsikan kapabilitas Pusdiklat Keuangan Umum untuk menyusun program pelatihan unggulan terkait *data analytics*. Belum lagi program pelatihan terkait *data analytics* merupakan sesuatu yang baru dan masih asing bukan hanya di level BPPK, tetapi juga Kementerian Keuangan. Dengan semangat yang besar, Heni menemui koleganya yang memiliki bisnis *startup* di bidang IT untuk berdiskusi tentang *data analytics*. Berbekal hasil diskusi tersebut, Heni kemudian menyampaikan pada para punggawaKU (para pegawai Pusdiklat Keuangan Umum) untuk menyusun pelatihan tersebut. Uniknya, rapat internal punggawaKU ini dilakukan di salah satu tempat ngopi, di malam hari disertai hujan. Urun rembuk pun terjadi dengan lebih santai tetapi tetap fokus. Ide – ide pun bermunculan terkait konsep program yang masih bersifat *raw* model.

Pemaparan pun dilakukan kepada Kepala BPPK yang saat itu dijabat Rionald Silaban. Walaupun dengan sedikit raut kebingungan karena keawaman akan substansi *data analytics* ini, Rionald merasakan dan mengagumi aura semangat yang dipancarkan Heni. Umpan balik yang didapatkan pun cukup membanggakan, berbagai respon positif dari *stakeholders* disampaikan dalam acara *stakeholders gathering* Pusdiklat Keuangan Umum di akhir 2019. “Berbagai *feedback* positif yang disampaikan melalui saya kemudian saya teruskan juga ke teman-teman Pusdiklat Keuangan Umum. Itu yang membuat mereka juga tetap semangat.” ujar Heni. Bahkan, Rionald Silaban, yang masih menjabat Kepala BPPK kala itu mengungkapkan penghargaannya kepada Heni terkait program pelatihan *data analytics* yang telah berjalan dengan sukses dengan berkata, “Gak nyangka kamu bisa ya.”

Pelatihan *data analytics* pun dilanjutkan pada tahun 2020 dan 2021 dengan para *stakeholder* yang makin banyak. “Kebutuhan *data analytics* ini makin luar biasa sampai widyaiswara yang menangani IT tidak pernah istirahat” ujar Heni sambil tersenyum simpul. Di awal 2022, Sekjen Kementerian Keuangan menyampaikan bahwa *data analytics* sifatnya masih eksklusif di kantor pusat, sehingga perlu untuk diampifikasi ke unit-unit daerah. Oleh karena itulah CTO dan Pusdiklat Keuangan Umum berkolaborasi untuk menyusun program RODAKU.

#### RODAKU - KOLABORASI TANPA BATAS

Perencanaan dan pelaksanaan pelatihan *data analytics* ini tentu tidak terlepas dari kolaborasi yang dilakukan dengan Sekretariat Jenderal dan *Central Transformation Office* (CTO) Kementerian Keuangan. Salah satu kerjasama dengan teman – teman CTO khususnya pada *Chief Data Management Officers* (CDMO) di tahun 2022 direalisasikan melalui *Workshop Road to Data Analytics* Kemenkeu Satu (RODAKU). Pucuk dicinta ulam pun tiba. Semangat yang digaungkan oleh Heni disambut dengan sangat baik melalui inisiasi penyampaian kebutuhan oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan.

Dalam tiga bulan (Maret-Mei 2022), perencanaan RODAKU ini berhasil dirampungkan. Masih segar dalam ingatan, Heni menjelaskan dengan komprehensif bahwa latar belakang RODAKU ini sendiri adalah bentuk program penguatan budaya data yang memperkenalkan *data analytics* kepada wilayah unit kerja Kementerian Keuangan di daerah, sehingga penggunaan dan *awareness* mengenai *data analytics* tidak hanya berada di dalam lingkup kantor pusat saja. Kesenjangan kompetensi inilah yang ingin diperkecil. Perbedaan paradigma juga ingin diluruskan. Sebagai senjatanya, Heni menyampaikan bahwa RODAKU ini menggunakan 2 *specific tool* yang digunakan dalam materi. *Project RODAKU* yang dikerjakan peserta memanfaatkan aplikasi *Microsoft Excel*

dan *Orange Data Mining*. Oleh karena itu, Heni berharap agar budaya data dapat terbangun. “Kantor vertikal Kementerian Keuangan yang di daerah bukan hanya sebagai penyedia data sumber, tetapi bisa juga berkontribusi sebagai analis data.”, tegas Heni.

Di lingkup internal, beliau juga berusaha mengoptimalkan perpanjangan tangan Pusdiklat di daerah yaitu Balai Diklat Keuangan (BDK) untuk punya andil juga. BDK dituntut proaktif sebagai tuan rumah penyelenggara dalam memetakan calon peserta dan menggali sumber daya pengajar lokal yang tersedia. Bukan hanya peserta, pengajar pun ternyata tidak hanya didominasi oleh CTO. Sesuai arah Kemenkeu Satu, para pengajar didatangkan dari berbagai unit eselon I (DJP, DJBC, DJPB, BPPK) yang memiliki kompetensi mumpuni dalam hal *data analytics*. Heni mengingatkan bahwa kolaborasi ini mampu memberikan nilai tambah berupa pengalaman dan *best practice*, yang tidak bisa diperoleh jika hanya mengandalkan sumber daya pengajar internal (widyaiswara). Beliau menyampaikan pula apresiasi kepada komunitas *Ministry of Finance - Data Analytics Community* (MOF-DAC) yang begitu luar biasa pertumbuhannya.



Proses belajar yang intens dan progresif di MOF-DAC pada ilmu *data analytics* bahkan diyakini Heni telah melampaui penyerapan kebutuhan pembelajaran yang ingin dipenuhi Pusdiklat Keuangan Umum. Komunitas ini pun berperan penting dalam proses perumusan kurikulum RODAKU dan turut serta menjadi pengajar.

**RODAKU – LEDAKAN KEBUTUHAN KOMPETENSI DATA**

Gema RODAKU ini ternyata membuat unit *stakeholder* yang meminta kebutuhan akan kompetensi *data analytics* pun semakin bertambah. Dari yang dulu hanya berasal dari Inspektorat Jenderal, sekarang diperebutkan oleh Setjen, DJBC, DJP, DJKN, dan DJPB turut. Antusiasme peserta tercermin dalam setiap usulan pengiriman peserta RODAKU.

Untuk tahun 2023, Analisis Kebutuhan Pembelajaran tahun 2022 menunjukkan permintaan kebutuhan pelatihan terkait *data analytics* yang sangat luar biasa dari berbagai *stakeholder* di setiap unit eselon I. Beliau menginginkan agar kebutuhan tersebut dapat dipenuhi dengan tetap menimbang kapasitas sumber daya pengajar internal yang dimiliki. “Dua widyaiswara andalan di bidang *data analytics* yang kami miliki yaitu pak Khamami dan pak Hekso, hampir tidak pernah berhenti mengajar di tahun 2022.”, ujar Heni.

Menariknya, Heni juga mengambil sudut pandang topi yang lain. Menurut Heni, banyaknya permintaan kebutuhan itu sendiri belum berpola. Belum ada pola pengembangan SDM terkait dengan kompetensi data. Oleh karena itu, beliau menegaskan kembali bahwa jangan sampai setiap unit tersebut melupakan kebutuhan kompetensi strategis yang seharusnya menjadi *core* masing – masing. Misalnya kompetensi perpajakan harus berfokus pada kebutuhan kompetensi inti perpajakan, kompetensi bea cukai harus berfokus pada kebutuhan kompetensi kepebeanaan dan cukai.

Kemampuan *data analytics* inilah yang kemudian menjadi kompetensi pendukung kompetensi *core* dimaksud. Heni menyimpulkan, “Ke depannya, keseluruhan kebutuhan kompetensi terkait *data analytics* ini harus disusun dalam suatu *learning journey*. Pusdiklat KU bersama dengan Pusintek, Biro SDM, Biro Organta, CTO, sedang mensintesisakan dokumen *learning journey* kompetensi data tersebut dengan kondisi paling cepat akan rampung di tahun 2023.”

**RODAKU - WHAT'S NEXT?**

Ketika ditanya tentang kepuasan pascapenyelenggaraan RODAKU ini, Heni menyahut bahwa jika berdasarkan hasil evaluasi level 1 saja, program ini dianggap sudah sangat baik dirasakan oleh peserta. Dua masukan yang berulang dan cukup klasik diutarakan sebagai masukan dari peserta yaitu waktu pelaksanaan yang kurang, dan model pembelajaran yang dirasa jauh lebih efektif dengan tatap muka (klasikal). Untuk saran yang kedua, jawab Heni, “Saya bukan mengatakan pelatihan jarak jauh (daring) itu tidak bagus, tetapi memang ada kelebihan yang dimiliki oleh model tatap muka dalam melakukan transfer pengetahuan dan asistensi.”

Beliau mengakui bahwa hanya ada 2 dari 11 Chapter RODAKU (Pontianak dan Manado) yang diselenggarakan secara tatap muka. Ranah keputusan penentuan model pembelajaran tadi pun tentu tidak bisa diambil dengan mudah mengingat banyak faktor pertimbangan yang salah satunya adalah alasan efisiensi anggaran. Terkait keberlanjutan program RODAKU ini, beliau menaruh harapan besar bahwa tahun depan akan tetap diselenggarakan dengan menyesuaikan kebutuhan para *stakeholder* yang utamanya dikompilasi dari CTO. Heni juga meyakini keseriusan terhadap keberlanjutan program ini juga ditentukan oleh dampak kegiatan akbar terkait *data analytics* lainnya yaitu *Finance and Health Hackathon 2022*. Kabar gembiranya, beliau menyampaikan bahwa ada rencana *e-learning* terkait *data analytics* akan dibuka secara umum (*open access*) bagi seluruh pegawai Kementerian Keuangan.

**LESSON LEARNED RODAKU BAGI BPPK**

Kesuksesan RODAKU ini memang tidak serta merta menunjukkan pemanfaatan *data analytics* yang sudah efektif di lingkup BPPK. Aplikasi Semantik dan *Kemenkeu Learning Center* (KLC) menjadi beberapa contoh aplikasi pembelajaran yang menjadi andalan BPPK. Hanya saja, Heni merasa bahwa sistem dan aplikasi tersebut belum secara optimal dimanfaatkan untuk dapat diolah dan dianalisis untuk menyederhanakan proses bisnis maupun pengambilan keputusan.

Misalnya saja data peserta pelatihan yang masih berganda antara data input semantik dan KLC. Begitu juga dengan inovasi aplikasi dan *dashboard* yang dihasilkan masing – masing Pusdiklat dianggap masih terdiri dari banyak *silo* yang berdiri sendiri dan belum terintegrasi dengan baik. Heni sangat

berharap bahwa ke depannya BPPK dapat semakin mengoptimalkan data yang sudah tersedia demikian banyaknya untuk dilakukan integrasi dan analisis.

**PESAN UNTUK GENERASI MUDA KEMENKEU**

Menggunakan filosofi pohon, Heni mengibaratkan pohon sebagai suatu struktur organisasi. Sembari menutup pertemuan siang itu, Heni berpesan, “Jika kita berada dalam sebuah organisasi, kerjakanlah sebaik mungkin. Sebagai apapun peran kita dalam pohon itu, tidak perlu membuat kita merasa tidak dihargai dan tidak ditonjolkan. Lakukanlah yang terbaik, semaksimal mungkin. Kalau menjadi batang, jadilah batang yang kokoh, supaya daun dan ranting dapat tumbuh. Kalau posisi kita sebagai daun, jadilah daun yang rimbun, supaya menjadi

tempat berteduh. Kalau sebagai akar, jangan pula bersedih. Akar memang tidak pernah kelihatan, bahkan diinjak, tetapi jadilah akar yang kuat, supaya pohon itu tetap berdiri. Jangan pernah iri dengan bagian lain, seperti bunga, karena ada kalanya bunga juga berisiko untuk dipetik.” Heni meyakini bahwa kesempatan untuk berkarya di berbagai peran pasti akan muncul. Oleh karena itu, jangan sekali – kali kita serakah dengan berusaha menjadi segalanya, apalagi mengecilkan arti peran orang lain.





# Serambi Ilmu

*Heru Wibowo*

PEMERATAAN  
PELAYANAN PUBLIK  
DAN PENINGKATAN  
KESEJAHTERAAN  
MASYARAKAT MELALUI  
UU NOMOR 1 TAHUN 2022  
TENTANG HUBUNGAN  
KEUANGAN ANTARA  
PEMERINTAH PUSAT DAN  
PEMERINTAHAN DAERAH

*Eri Hariyanto*

HUMAS BUKAN TUKANG  
FOTO: SEBUAH UPAYA  
MEMBANGUN HUMAS  
YANG RESPONSIF DI ERA  
PERUBAHAN

*Kristian Agung Prasetyo*

SENGSARA SEBELUM  
NIKMAT: *ORDEAL*  
*MECHANISM* DALAM  
PENYALURAN PERTALITE

**HERU WIBOWO**  
KEPALA PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEKAYAAN NEGARA DAN PERIMBANGAN KEUANGAN

# PEMERATAAN PELAYANAN PUBLIK DAN PENINGKATAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT MELALUI UU NOMOR 1 TAHUN 2022 TENTANG HUBUNGAN KEUANGAN ANTARA PEMERINTAH PUSAT DAN PEMERINTAHAN DAERAH

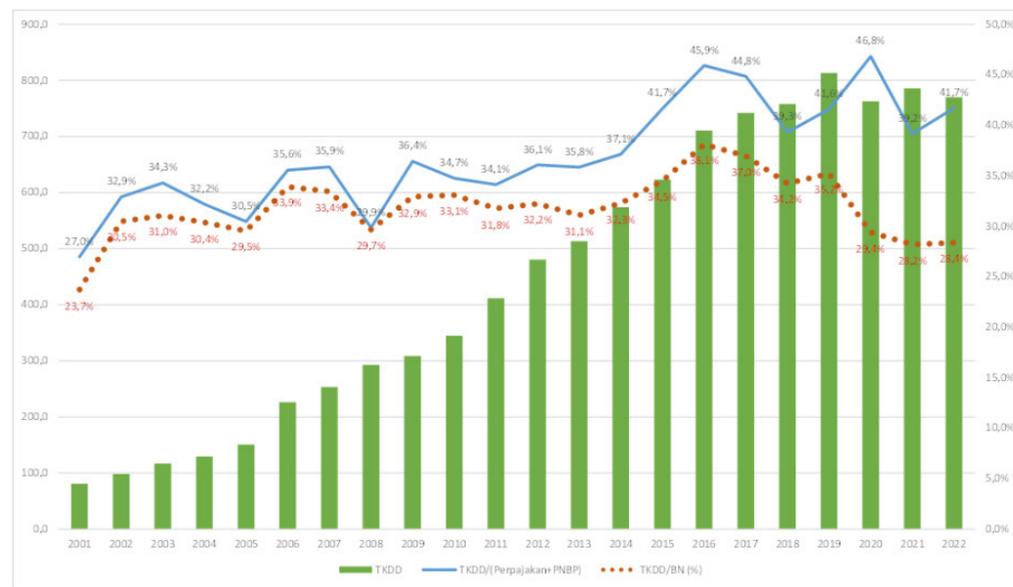
## PENGANTAR: DESENTRALISASI FISKAL DAN CAPAIANNYA

Desentralisasi fiskal sudah berjalan lebih dari 20 tahun di Indonesia pascapengesahan Undang-Undang (UU) Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Republik Indonesia, 1999). Lahirnya UU tersebut menandai pola baru hubungan antara Pemerintah Pusat dan pemerintahan daerah yang dimaksudkan antara lain untuk mengakomodir tuntutan daerah penghasil atas pembagian hasil eksplorasi Sumber Daya Alam (SDA) yang lebih besar bagi mereka (*aspiration to inequality*) (Kuncoro & Resosudarmo, 2006) dan sekaligus untuk menjaga kesatuan bangsa Indonesia (Tadjoeddin, Suharyo, & Mishra, 2001). Dalam perjalanannya, UU tersebut dicabut dengan UU No. 33 Tahun 2004 (Republik Indonesia, 2004) dan terakhir dengan UU Nomor 1 Tahun 2022 UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Republik Indonesia, 2022) untuk disesuaikan dengan dinamika perkembangan masyarakat dan antisipasi atas berbagai tantangan pelaksanaan desentralisasi fiskal di masa mendatang.

Pelaksanaan desentralisasi fiskal pascareformasi tahun 1998 diikuti dengan transfer dana melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk membiayai berbagai kewenangan yang dilimpahkan oleh Pemerintah Pusat kepada pemerintahan daerah.

Merujuk kepada UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya untuk mengurus sendiri urusan pemerintahan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan. Adapun urusan Pemerintah Pusat hanya mencakup politik luar negeri, pertahanan, keamanan, yustisi, moneter dan fiskal nasional, dan agama (Republik Indonesia, 2004). Grafik 1 menunjukkan perkembangan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) yang berasal dari APBN sebagai salah satu sumber pendapatan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Grafik 1 menunjukkan perkembangan TKDD yang meningkat pesat sejak tahun 2001. Dalam kurun waktu 2001-2022, transfer ke daerah dan dana desa rata-rata meningkat 11,8% per tahun. TKDD yang pada tahun 2001 hanya mencapai Rp81,1 triliun telah meningkat 9,5 kali lipat menjadi Rp769,6 triliun pada APBN Tahun Anggaran 2022. Seiring dengan peningkatan nilai nominal TKDD, proporsinya terhadap belanja negara juga mengalami peningkatan yang signifikan. Dalam periode 2001-2022, rata-rata 31,8% belanja negara dialokasikan untuk TKDD. Apabila dibandingkan dengan pendapatan



Grafik 1 Perkembangan TKDD 2001-2022  
Sumber: Buku Saku APBN, LKPP (diolah)

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Gini ratio	37,8	38,8	41,3	40,6	41,4	40,2	39,4	39,1	38,4	38	38,5	38,1
Harapan Hidup saat Lahir (tahun)	69,81	70,01	70,2	70,4	70,59	70,78	70,9	71,06	71,2	71,34	71,47	71,57
Harapan Lama Sekolah (tahun)	11,29	11,44	11,68	12,1	12,39	12,55	12,72	12,85	12,91	12,95	12,98	13,08
Rata-rata Lama Sekolah (tahun)	7,46	7,52	7,59	7,61	7,73	7,84	7,95	8,1	8,17	8,34	8,48	8,54
Tingkat kemiskinan (%)	13,33	12,5	12,36	11,47	10,96	11,13	10,7	10,12	9,66	9,22	10,19	9,71
Pengeluaran per Kapita Disesuaikan (Ribu Rupiah/Orang/Tahun)	9.437	9.647	9.815	9.858	9.903	10.150	10.420	10.664	11.059	11.299	11.013	11.156
Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	66,53	67,09	67,7	68,31	68,9	69,55	70,18	70,81	71,39	71,92	71,94	72,29

Tabel 1 Perkembangan Indikator Kesejahteraan Masyarakat  
Sumber: BPS

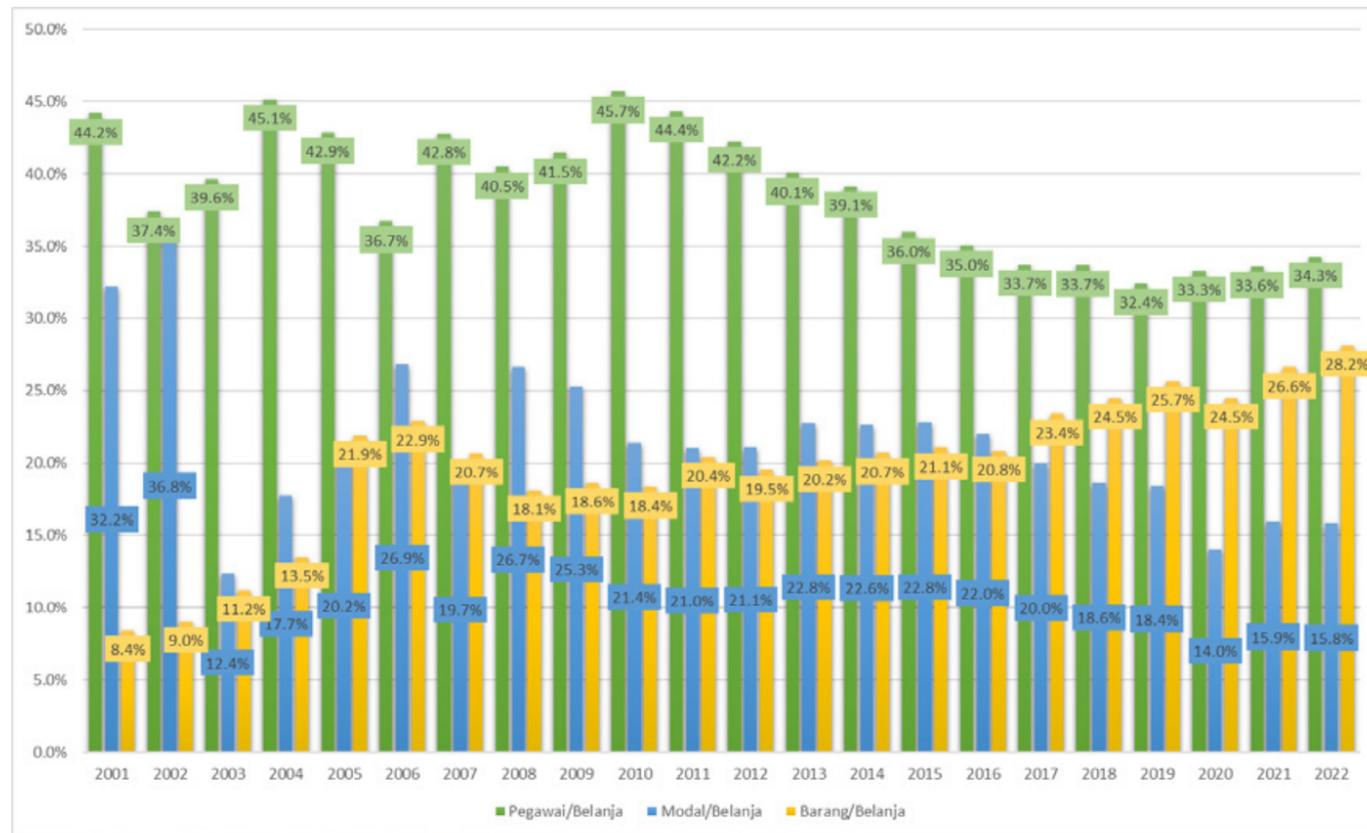
negara (penerimaan perpajakan dan Penerimaan Negara Bukan Pajak) maka proporsi TKDD bahkan lebih besar lagi, yaitu rata-rata mencapai 37% dalam periode tersebut. Besarnya proporsi TKDD dalam APBN ini telah mampu menurunkan kesenjangan kemampuan diindikasikan oleh *Theil index* yang menurun dari 0,332 pada tahun 2016 menjadi 0,23 pada tahun 2020 (Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) Kementerian Keuangan, 2022). Kondisi ini dapat dipahami sebagai ketersediaan sumber pembiayaan pelayanan publik dan pembangunan daerah yang lebih besar dalam APBD.

Tidak hanya dari sisi kapasitas fiskal daerah yang meningkat, desentralisasi fiskal yang salah satu instrumennya adalah TKDD juga telah berhasil meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Tabel 1 menunjukkan perkembangan berbagai indikator kesejahteraan masyarakat yang semakin baik di era desentralisasi fiskal ini.

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang pada tahun 2001 baru mencapai 60,9 meningkat menjadi 72,29 pada tahun 2021. Hal ini mengindikasikan akses yang semakin baik bagi masyarakat atas hasil pembangunan di era desentralisasi fiskal ini, misalnya untuk memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya. Angka harapan hidup yang semakin meningkat, harapan lama sekolah yang semakin tinggi, dan pengeluaran per kapita yang meningkat telah berkontribusi terhadap peningkatan IPM nasional. Ketimpangan pendapatan yang diindikasikan oleh *Gini ratio* juga menunjukkan perkembangan yang menurun secara bertahap dalam beberapa tahun terakhir. Dalam periode sebelumnya, ketimpangan pendapatan cenderung meningkat yang disebabkan antara lain oleh perbedaan sumber daya alam yang dimiliki oleh daerah (Ahmad & Hofman, 2000) dan penguasaan sumber daya oleh suatu kelompok kepentingan tertentu (Martinez-Vazquez & McNab, 2003). Tabel 1 juga mengonfirmasi kontribusi positif desentralisasi fiskal terhadap penurunan tingkat kemiskinan (Wibowo & Oktivalerina, 2022).

## TANTANGAN DALAM PELAKSANAAN DESENTRALISASI FISKAL DI INDONESIA

Capaian pelaksanaan kebijakan desentralisasi fiskal di atas patut disyukuri dan senantiasa perlu diupayakan untuk semakin baik kedepannya. Untuk itu, monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan kebijakan desentralisasi fiskal dan berbagai tantangan yang dihadapi perlu dilakukan sebagai input bagi perbaikan kebijakan. Beberapa tantangan tersebut antara lain: pertama, belum optimalnya pemanfaatan transfer ke daerah dan dana desa untuk membiayai belanja publik yang lebih produktif. Hal ini dapat dilihat dari realisasi belanja pegawai yang mencapai rata-rata 38,8% dari total APBD dalam kurun waktu 2001-2022 (Grafik 2). APBD juga kurang memprioritaskan belanja modal dan banyak menggantungkan kepada Dana Alokasi Khusus (DAK) sebagai salah satu sumber belanja modalnya. Dalam periode tahun 2001-2022, proporsi DAK terhadap belanja modal pemerintah daerah rata-rata mencapai 58,9%.



Grafik 2 Perkembangan Komposisi Belanja APBD  
 Sumber: Portal data APBD-DJPK (diolah)

Disamping menunjukkan dominasi belanja pegawai dalam struktur belanja APBD, Grafik 2 juga menunjukkan proporsinya yang cenderung menurun dalam beberapa tahun terakhir. Hal ini perlu dilanjutkan untuk memberikan ruang fiskal (fiscal space) yang lebih luas untuk belanja produktif. Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Tahun Anggaran 2022 sesungguhnya telah mengamanatkan alokasi belanja pegawai diluar tunjangan guru maksimal 30% dari total belanja APBD (Kementerian Dalam Negeri RI, 2021). Porsi belanja pegawai yang lebih dari 30% dari total belanja APBD diminta untuk disesuaikan

secara bertahap dalam waktu lima tahun. Apabila Pemerintah Daerah konsisten memprioritaskan belanja modal yang lebih besar dan sinergis dengan DAK dalam APBD-nya, maka dampaknya terhadap pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana yang terkait langsung dengan peningkatan layanan publik dan pertumbuhan ekonomi daerah tentunya akan lebih besar.

*Kedua*, program atau kegiatan di APBD yang sangat banyak sehingga belanja APBD kurang fokus dan kurang efektif dalam membenahi pelayanan publik dan pembangunan di daerah. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya program dan kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah

daerah. Data DJPK menunjukkan ada 29.623 program dan 263.135 kegiatan (DJPK Kementerian Keuangan, 2022). Kondisi ini menyebabkan relatif kecilnya sumber pembiayaan bagi masing-masing program dan kegiatan sehingga tidak dapat dituntaskan dengan kualitas yang baik.

*Ketiga*, meskipun terjadi peningkatan, namun kontribusi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) dalam pendapatan APBD relatif masih rendah. Dalam periode 2001-2022, rata-rata share Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah

terhadap total pendapatan APBD baru mencapai 21%. Di sisi lain, rata-rata *share* TKDD dalam total pendapatan APBD provinsi dan kabupaten/kota mencapai 66%. Kondisi ini menunjukkan tingginya ketergantungan APBD terhadap transfer dari APBN dan rendahnya kemandirian fiskal daerah.

*Keempat*, pemanfaatan sumber dan skema pembiayaan daerah yang relatif terbatas pada APBD dan belum mengeksplorasi *creative financing* secara luas, misalnya skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) dan pinjaman daerah. KPBU merupakan salah satu sumber pembiayaan penyediaan infrastruktur dan/atau layanan lainnya untuk kepentingan umum berdasarkan persyaratan yang telah ditentukan pemerintah dengan sumber pembiayaan dari badan usaha (sebagian/seluruhnya) dengan pembagian risiko antar para pihak (Direktorat Pengelolaan Dukungan Pemerintah dan Pembiayaan Infrastruktur (PDPPI), 2022). Sumber pembiayaan lain yang dapat dimanfaatkan oleh pemerintah daerah untuk pembiayaan APBD adalah pinjaman daerah yang saat ini masih relatif rendah. Pinjaman daerah dapat dipergunakan untuk membiayai berbagai program dan kegiatan pembangunan, baik fisik maupun non fisik. Sebagai contoh, dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 117/PMK.07/2021, batas maksimal kumulatif pinjaman daerah ditetapkan pemerintah sebesar 0,32% dari proyeksi PDB Tahun Anggaran 2022 (Kementerian Keuangan RI, 2021). Data DJPK menunjukkan bahwa total pinjaman daerah di Indonesia dalam periode 2001-2021 rata-rata baru mencapai 0,028% dari PDB atau Rp3,46 triliun. Rendahnya pinjaman daerah dikarenakan perlunya kesiapan dan kelengkapan administrasi dan dokumennya (misalnya prasyarat adanya kajian kelayakan program/proyek yang akan dibiayai pinjaman), PAD yang

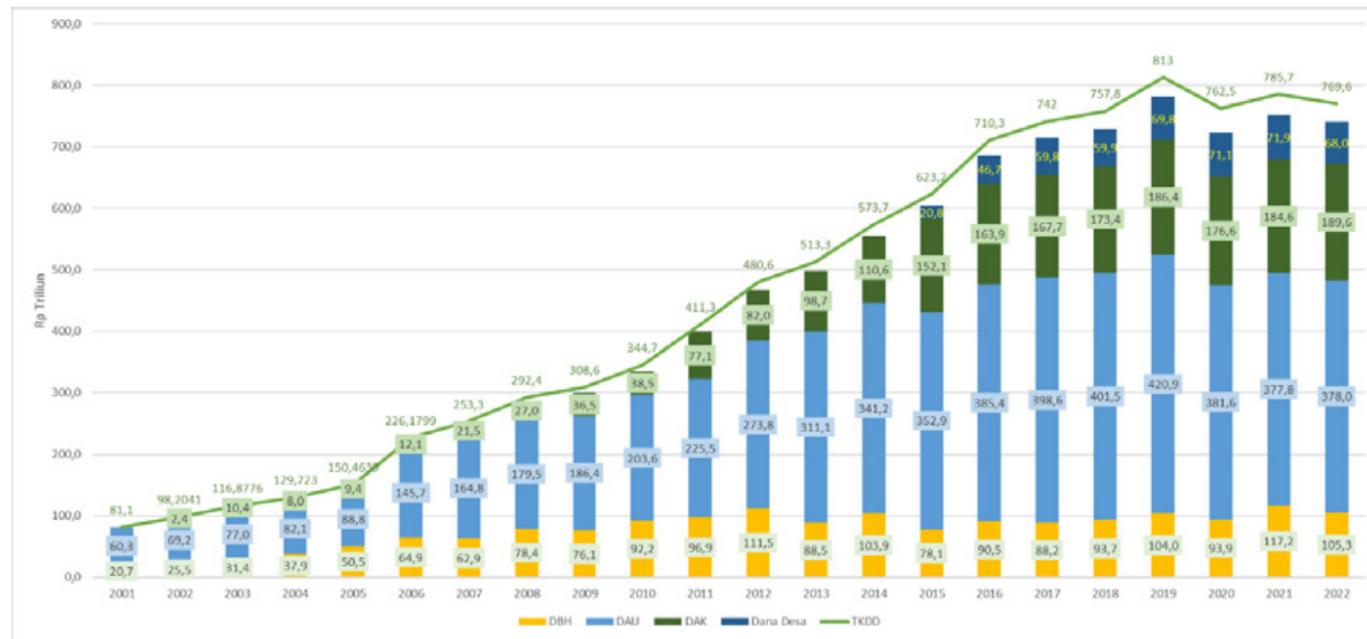
relatif rendah dan fluktuatif, dan juga perlunya persetujuan DPRD (Ananda, 2022). Sinergi pendanaan, baik dari KPBU dan pinjaman daerah, memungkinkan tersedianya sumber pembiayaan yang lebih besar untuk akselerasi pembangunan infrastruktur daerah, layanan publik, dan program prioritas lainnya.

*Kelima*, sinergi kebijakan fiskal pusat dan daerah yang belum optimal. Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, di era desentralisasi fiskal pemerintah daerah mempunyai kewenangan yang lebih luas dalam penyediaan layanan publik. Diharapkan hal tersebut akan mempercepat penyediaan layanan publik dan meningkatkan akurasi program yang diperlukan oleh masyarakat daerah (Oates, 1999) karena jarak pemerintahan yang lebih dekat dengan mereka (Tiebout, 1956). Kondisi ini menuntut *link and match* antara kebijakan fiskal pemerintah daerah dengan pemerintah Pusat agar program/kegiatan yang dilaksanakan dapat dituntaskan sesuai dengan kewenangan masing-masing. Kegagalan mengorkestrasi dan menyinergikan kebijakan fiskal di antara berbagai tingkatan pemerintahan akan mengurangi dampak pengganda (*multiplier effect*) positif dari program dan kegiatan yang dilaksanakan. Sebagai contoh, berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan, status jalan terbagi menjadi 5 jenis, antara lain jalan nasional, jalan provinsi, jalan kabupaten, jalan kota, dan jalan desa yang merepresentasikan kewenangan masing-masing tingkatan pemerintahan (Republik Indonesia, 2006; Republik Indonesia, 2022). Tanpa koordinasi dan sinkronisasi program/kegiatan, perbedaan kewenangan atas jalan sesuai statusnya tersebut menyebabkan antara lain terjadinya diskoneksi jaringan jalan dan terkendalanya pemeliharaan dan perbaikan kerusakan jalan di daerah.

**PERBAIKAN KEBIJAKAN DESENTRALISASI FISKAL DALAM UU HKPD**

UU HKPD lahir dan didesain untuk menjawab berbagai tantangan diatas dan memperkuat desentralisasi fiskal yang adil, transparan, akuntabel, dan berkinerja untuk mewujudkan pemerataan layanan publik dan kesejahteraan masyarakat. Kebijakan korektif UU HKPD disandarkan pada empat pilar utama untuk menghadapi dan mengantisipasi berbagai tantangan pelaksanaan kebijakan desentralisasi fiskal di Indonesia (DJPK Kementerian Keuangan, 2022), yaitu:

*Pertama*, memperbaiki kebijakan transfer ke daerah dalam rangka mengembangkan hubungan keuangan pemerintah Pusat dan pemerintahan daerah dengan memperkecil ketimpangan vertikal dan horizontal. Ketimpangan vertikal merepresentasikan perbedaan kapasitas dan kebutuhan fiskal antara pemerintah Pusat dan pemerintahan daerah (Suyanto, 2017), sedangkan ketimpangan horizontal menunjukkan ketimpangan fiskal antar daerah. Grafik 3 menunjukkan peran signifikan Dana Alokasi Umum (DAU) sebagai instrumen mengurangi ketimpangan horizontal bersama-sama dengan Dana Alokasi Khusus (DAK). Dalam periode 2001-2022, DAU yang ditransfer ke daerah rata-rata mencapai 58,7% dari TKDD, sedangkan Dana Bagi Hasil (DBH) rata-rata mencapai 20,8%. Adapun DAK yang dialokasikan untuk mendanai program, kegiatan, dan/atau kebijakan untuk mencapai prioritas nasional, mempercepat pembangunan daerah, mengurangi kesenjangan layanan publik, mendorong pertumbuhan perekonomian daerah, dan mendukung operasionalisasi layanan publik, cenderung meningkat proporsinya dari tahun ke tahun. Dalam periode 2001-2022, 15,1% TKDD dialokasikan untuk DAK.



Grafik 3 Perkembangan Komponen TKDD  
Sumber: Buku Saku APBN, LKPP (diolah dari berbagai edisi)

UU HKPD melakukan redesign kebijakan transfer ke daerah dengan mengaitkan penyalurannya dengan capaian kinerja pemerintah daerah. Dengan demikian diharapkan berbagai komponen Transfer ke Daerah, yaitu DBH, DAU, DAK, Dana Otonomi Khusus dan Dana Keistimewaan DIY, dan Dana Desa dapat lebih efektif dan efisien dalam mengurangi ketimpangan vertikal dan horizontal sehingga pemerintah daerah mempunyai sumber pendanaan yang lebih besar untuk memberikan layanan publik yang lebih baik dan merata bagi masyarakat. Adapun bagi daerah dengan kapasitas fiskal sangat tinggi dan sudah mampu memberikan layanan publik yang baik dapat membentuk Dana Abadi Daerah yang hasil kelolaannya dapat digunakan untuk membiayai belanja daerah guna memperoleh manfaat ekonomi, manfaat sosial, dan manfaat lainnya lintas generasi.

*Kedua*, mengembangkan sistem pajak daerah dan retribusi daerah yang mendukung alokasi sumber daya nasional

yang efisien dengan tetap menjaga iklim berusaha dan investasi yang kondusif. Pajak daerah dan retribusi daerah merupakan komponen penting dalam penerimaan APBD yang diharapkan dapat menjadi tulang punggung bagi pembiayaan belanja daerah. Beberapa penataan yang dilakukan dalam UU HKPD ini termasuk menurunkan biaya administrasi dan pemenuhannya (*administration and compliance cost*), memperluas basis pajak dengan pemberian opsen pajak provinsi dan kabupaten/kota, serta harmonisasi dan sinergi dengan peraturan perundangan lainnya. Skema opsen adalah pungutan tambahan pajak menurut persentase tertentu yang didasarkan atas ketentuan yang berlaku. Opsen diharapkan dapat memandirikan fiskal daerah tanpa menambah beban Wajib Pajak. Dalam UU HKPD, terdapat 3 opsen, yaitu opsen Pajak Kendaraan Bermotor (Opsen PKB) yang dikenakan oleh kabupaten/kota atas pokok PKB, Opsen Bea Balik Nama

Kendaraan Bermotor (Opsen BBNKB) yang dikenakan oleh kabupaten/kota atas pokok BBNKB, dan Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (Opsen MBLB) yang dikenakan oleh provinsi atas pokok MBLB. Peningkatan *local taxing power* ini akan meningkatkan kemandirian fiskal pemerintah daerah dalam melaksanakan berbagai kewenangan yang dimilikinya dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan dan daya saing daerah.

*Ketiga*, meningkatkan kualitas belanja daerah yang lebih efisien, produktif, dan akuntabel dengan memberikan keleluasaan daerah untuk menyesuaikan dengan karakteristik daerahnya sehingga mempunyai *multiplier effect* yang optimal bagi layanan publik dan kesejahteraan masyarakat. UU No. 1 Tahun 2022 telah mengamanatkan berbagai jenis belanja dalam APBD, antara lain mewajibkan pemenuhan belanja *mandatory* tertentu yang besarnya telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (Pasal 145), mengendalikan

belanja pegawai paling tinggi 30% dari total belanja APBD dan graduasi penyesuaiannya paling lama 5 tahun untuk yang melebihi 30% (Pasal 146), penguatan belanja infrastruktur pelayanan publik dengan batasan minimal 40% dari total belanja APBD diluar transfer ke daerah bawahan dan desa serta pemenuhannya dalam kurun waktu 5 tahun (Pasal 147), serta penguatan sanksi penundaan dan/atau pemotongan dana TKD yang tidak ditentukan penggunaannya (Pasal 148). Untuk mencapai belanja daerah yang berkualitas tersebut maka diperlukan Sumber Daya Manusia (SDM) pengelola keuangan yang kompeten yang dibuktikan dengan sertifikasi dari lembaga yang ditunjuk oleh pemerintah. Tak kalah penting pula pengawasan APBD yang memadai untuk menjaga tata kelola dan akuntabilitasnya.

*Keempat*, harmonisasi belanja pusat dan daerah untuk penyelenggaraan layanan publik yang optimal dan menjaga kesinambungan fiskal. Hal tersebut dilakukan dengan berbagai langkah, diantaranya harmonisasi kebijakan fiskal pusat dan daerah yang mengacu kepada berbagai peraturan perundang-undangan, penetapan batas kumulatif defisit dan pembiayaan utang APBD, pengendalian dalam kondisi darurat dengan refocusing APBD dan pengendalian defisit serta pembiayaan utang daerah, serta sinergi Bagan Akun Standar untuk penyelarasan program dan kegiatan serta keluaran. Sinergi dan harmonisasi APBN dan APBD diharapkan dapat mengamplifikasi capaian program/kegiatan yang dilaksanakan untuk pencapaian tujuan nasional.

## PENUTUP

UU Nomor 1 Tahun 2022 menandai tahapan baru dalam pelaksanaan kebijakan desentralisasi fiskal di Indonesia. Pemberlakuan UU ini diharapkan dapat memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan di daerah sekaligus mendorong tanggung jawab daerah dalam memberikan layanan publik yang semakin merata dan lebih baik. Dengan menurunnya kesenjangan kemampuan keuangan antar daerah, meningkatnya penerimaan pajak daerah sebagai sumber pembiayaan belanja daerah, pengelolaan administrasi keuangan daerah yang semakin efisien, efektif, dan akuntabel, serta menguatnya sinergi kebijakan fiskal antara Pemerintah Pusat dan pemerintahan daerah, maka dana yang digelontorkan ke daerah melalui TKD dapat berkontribusi lebih nyata terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat, seperti peningkatan IPM, menurunnya ketimpangan pendapatan dan jumlah penduduk miskin, serta akselerasi pemulihan perekonomian nasional pascapandemi Covid-19. Untuk itu pelaksanaan UU HKPD dan berbagai peraturan turunannya secara konsisten dan akuntabel adalah keharusan. Tak kalah penting adalah monitoring dan evaluasi dilakukan secara berkesinambungan, baik oleh Pemerintah Pusat maupun pemerintahan daerah, agar desentralisasi fiskal semakin berdampak positif bagi pemerataan layanan publik dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah mempunyai waktu paling lama 2 tahun untuk menyelesaikan berbagai peraturan

pelaksanaan dari UU HKPD. Oleh karenanya, sudah menjadi kewajiban kita bersama untuk turut berkontribusi memberikan masukan dan dukungan agar peraturan pelaksanaan UU HKPD dapat diselesaikan tepat waktu, sehingga desentralisasi fiskal lebih optimal dalam menyetarakan layanan publik dan menyejahterakan rakyat di seluruh pelosok tanah air. Semoga.

ERI HARIYANTO  
WIDYAISWARA MADYA PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEUANGAN UMUM

# HUMAS BUKAN TUKANG FOTO: SEBUAH UPAYA MEMBANGUN HUMAS YANG RESPONSIF DI ERA PERUBAHAN

## HUMAS ITU STRATEGIS

Di zaman ini masih adakah yang menganggap fungsi Humas (hubungan masyarakat) dalam suatu institusi, khususnya institusi pemerintah, hanya sebagai tukang foto dan pembuat berita kegiatan kantor? Atau masih adakah bagian pemerintahan di republik ini yang menugasi bagian humas sebagai tukang foto dan unggah pengumuman?

Jika jawaban keduanya: masih, patut diduga pengelola institusi itu belum pernah membaca buku-buku “Paradigma Baru Komunikasi Pemerintah di Era Revolusi Industri 4.0” (Hariyanto dan Juniari, 2019). Tulisan dalam artikel ini mengambil beberapa bagian dalam buku tersebut.

Tukang foto, unggah berita dan pengumuman itu memang bagian dari tugas Humas. Namun, tugas Humas tentu bukan itu saja. Bagian Humas masih sering diremehkan, dianggap hanya tugas dukungan dan tidak strategis. Benarkah begitu?

Perubahan paradigma pengelolaan pemerintahan dari *Old Administration* menjadi *New Public Management* dan *New Public Service*, diikuti dengan perubahan dalam komunikasi publik. Humas pemerintah dituntut untuk bisa mengkomunikasikan kebijakan, rencana kerja, dan capaian kinerja kepada masyarakat luas, melalui media tradisional, media konvensional, dan media baru dengan memanfaatkan teknologi internet (media sosial).

Sebagaimana Instruksi Presiden No 9 Tahun 2015, pengelolaan komunikasi publik membutuhkan kerjasama strategis dengan berbagai elemen komunikasi dan kehumasan pemerintah. Hal ini bertujuan untuk percepatan penyebaran informasi kepada masyarakat dan mengakomodasi respon atau masukan dari masyarakat mengenai kebijakan pemerintah. Hal terpenting saat ini adalah masyarakat memahami apa yang dilakukan pemerintah.

Kepedulian (*awareness*) pentingnya komunikasi era digital untuk memastikan masyarakat mengetahui fungsi-fungsi politik eksekutif yang dijalankan. Atas pemahaman masyarakat akan berkembang partisipasi dalam pembangunan, terutama pentingnya masukan dalam hal pengawasan.

Komunikasi pemerintah yang efektif kepada masyarakat juga menghasilkan kepercayaan (*trust*). Kepercayaan dalam hal ini bukan hanya kepercayaan dari masyarakat domestik, tetapi termasuk masyarakat internasional. Sebagai contoh, masyarakat Indonesia yang bersedia membayar pajak selain merupakan kewajiban juga merupakan wujud kepercayaan kepada pemerintah bahwa pajak yang dibayarkan akan digunakan sesuai dengan fungsi fiskal yaitu: alokasi, distribusi dan stabilisasi.

Komunikasi pemerintah mengenai keberhasilan pemerintah dalam menjaga stabilitas ekonomi dan keamanan dapat menghasilkan kepercayaan dari masyarakat internasional. Sebagai contoh,

adanya investasi asing baik dalam bentuk investasi langsung maupun investasi pada sektor keuangan (sukuk, obligasi atau saham) merupakan bentuk *trust* dari masyarakat internasional. Dengan komunikasi yang baik, pemerintah dapat meyakinkan bahwa kondisi Indonesia layak untuk investasi dan menjamin keamanan aset para investor.

Sampai di sini kita menjadi paham bahwa tugas komunikasi publik oleh unit kehumasan itu sangat strategis. Sekali lagi, Humas bukan sekadar tukang foto.

## KEPERCAYAAN PUBLIK YANG MAKIN TERBANGUN

Membangun *trust* sangatlah penting bagi pemerintah karena kepercayaan masyarakat merupakan salah satu modal utama dalam membentuk negara yang konstruktif dan efisien.

Kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah memberi pengaruh besar terhadap kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh pemerintah. Apabila kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah sangat tinggi maka masyarakat mudah menerima dan menjalankan kebijakan pemerintah tersebut.

Tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah juga dipengaruhi oleh respon pemerintah terhadap masyarakat. Jika pemerintah menunjukkan sikap peduli dan cepat tanggap terhadap permasalahan yang dialami oleh masyarakat, maka masyarakat akan semakin percaya dengan kredibilitas pemerintah.

Di era yang penuh tantangan dan perubahan seperti saat ini, meraih kepercayaan masyarakat tentu memerlukan perjuangan yang tidak mudah.

Kita patut bersyukur bahwa ditengah berbagai tantangan global dan domestik, tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah masih cukup tinggi.

**Edelman Trust Barometer** merilis hasil survey pada awal 2022. Indonesia berada pada posisi empat besar negara dengan tingkat kepercayaan masyarakat yang tinggi terhadap pemerintahan.

Indonesia memiliki tingkat kepercayaan sebesar 76%, naik 6% dari tahun sebelumnya. Indonesia hanya berada di bawah China (91%), Uni Emirat Arab (87%), Arab Saudi (82%).

## KIAT HUMAS MERAWAT KEPERCAYAAN PUBLIK

Prestasi berupa kepercayaan dari publik tentu perlu dijaga agar tidak mengalami penurunan, bahkan berujung pada ketidakpercayaan publik. Unit-unit

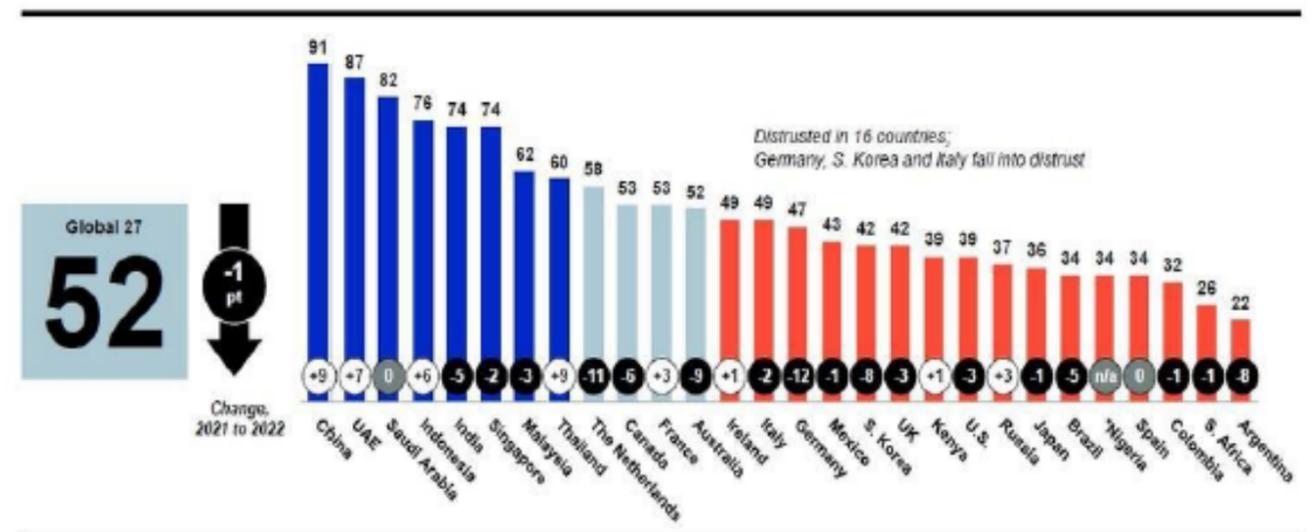
Humas memiliki peranan yang sangat penting untuk menjaga prestasi tersebut. Di bawah ini kita akan mendiskusikan hal-hal yang sangat penting untuk diperhatikan dalam merawat kepercayaan publik.

Humas zaman sekarang sudah tidak dapat lagi menggunakan gaya lama yang kaku, penyampaian informasi dengan gaya tradisional seperti: penyebaran *press release* atau sekedar konferensi pers, penggunaan media konvensional yang terjadwal, serta sumber informasi tunggal. Pola komunikasi yang mengabaikan peran serta masyarakat juga harus ditinggalkan atau masyarakat meninggalkan birokrasi yang masih menggunakan pola komunikasi pemerintah gaya lama.

Sebagai bagian paradigma baru komunikasi pemerintah, Humas kini berpartisipasi mewujudkan pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan memberikan saluran kepada masyarakat untuk berpartisipasi dan kolaborasi dalam menjalankan pembangunan. Humas setidaknya menerapkan langkah-langkah berikut ini, seperti:

## 1. Menggunakan strategi komunikasi yang tepat

Strategi komunikasi merupakan cara atau jalan untuk mengatur pelaksanaan operasi komunikasi agar berhasil, menggunakan format yang tepat. Strategi dalam komunikasi adalah cara mengatur pelaksanaan operasi komunikasi agar berhasil. Strategi komunikasi pada hakikatnya adalah perencanaan (*planning*) dan manajemen (*management*) untuk mencapai satu tujuan. Untuk mencapai tujuan tersebut, strategi tidak berfungsi sebagai peta jalan yang hanya menunjukkan arah, tetapi juga harus menunjukkan taktik operasionalnya. Oleh karenanya dari paparan teori diatas, pada saat komunikator berkomunikasi harus membuat strategi komunikasi terlebih dahulu, agar pesan yang disampaikan bisa mencapai target komunikasi yang diinginkan.



2022 Edelman Trust Barometer. TRU\_1NS. [Government in general] Below is a list of institutions. For each one, please indicate how much you trust that institution to do what is right. 9-point scale; top 4 box, trust. General population, 27-mlt avg. \*Nigeria is not included in the global average

Edelman 42

Source: Edelman Trust Barometer Survey Report

## 2. Menggunakan sumber informasi yang majemuk.

Kebutuhan masyarakat terhadap organisasi pemerintah yang terpercaya, perlu diyakinkan oleh berbagai sumber informasi. Seperti diulas sebelumnya, komunikasi yang dilakukan oleh Pemerintah salah satunya bertujuan untuk memperoleh kepercayaan masyarakat. Untuk mencapai hal tersebut, penyampaian komunikasi publik saat ini tidak dapat bergantung pada satu figur sentral saja. Misalnya: pada organisasi kementerian hanya terpusat kepada figur seorang menteri. Di tengah tuntutan tugas birokrasi dan politik yang sangat banyak, kehadiran seorang menteri sebagai komunikator pemerintah tentu sangat sulit.

Untuk itu dibuat suatu strategi agar penyampaian komunikasi dapat dilakukan oleh pihak lain, diantaranya:

Pejabat struktural pada kementerian terkait, yaitu pejabat setingkat eselon I (direktur jenderal, staf ahli, dll), pejabat setingkat eselon II (direktur, kepala biro, dll), dan pejabat eselon III.

Pengamat atau akademisi yang memahami tugas atau permasalahan tertentu di kementerian tersebut. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan kredibilitas kementerian dengan menggunakan sudut pandang dari pihak luar pemerintah. Sebagai contoh: untuk meningkatkan kepercayaan publik terhadap pengelolaan APBN, Kementerian Keuangan dapat meminta opini dari pengamat ekonomi yang kompeten dan mendukung kebijakan pemerintah.

Para profesional, misalnya pengusaha atau pimpinan manajerial di perusahaan swasta atau BUMN. Penyampaian informasi terkait kebijakan pemerintah dari sudut pandang para profesional sangat diperlukan. Pendapat dari para

profesional merupakan wujud dari pembuatan kebijakan kolaboratif yang memberikan kesempatan kepada *stakeholder* untuk berpartisipasi dalam memberikan gagasan melalui komunikasi dua arah.

## 3. Responsif sebagai jawaban atas tuntutan transparansi dan akuntabilitas

Perkembangan teknologi memungkinkan Pemerintah menyampaikan komunikasi kepada publik kapan saja diperlukan, tanpa terikat jadwal tertentu. Namun yang perlu diperhatikan adalah momentum (saat yang tepat) penyampaian informasi tersebut agar meningkatkan dampak dari komunikasi pemerintah. Sebagai contoh: isu utang pemerintah merupakan isu yang menarik bagi publik sepanjang tahun.

Dalam satu tahun beberapa kali muncul isu utang yang dilontarkan oleh para pengamat. Isu tersebut bisa jadi kurang proporsional atau dapat menurunkan citra pemerintah. Dalam kondisi ini, pemerintah sebaiknya responsif memberikan tanggapan atas isu tersebut. Momentum yang tepat dapat menjawab isu negatif yang diberikan sekaligus memperoleh perhatian dari publik. Menunda pemberian respon merupakan hal yang kurang baik karena masyarakat akan terlanjur merekam informasi pertama yang kurang proporsional.

Selain komunikasi yang bersifat responsif, pemerintah juga tetap memiliki kesempatan terbuka untuk menyampaikan informasi kepada masyarakat secara terjadwal dan kontinyu untuk membangun citra positif pemerintah.

## 4. Mudah menyesuaikan diri dengan keadaan (adaptif)

Pemerintahan adaptif adalah pemerintahan yang mau mengerti kebutuhan rakyatnya secara progresif.

Pemerintahan seperti ini mampu melihat berbagai masalah dari berbagai sudut pandang sehingga dapat menemukan penanganan yang lebih efektif dan mengena bagi rakyat.

Humas sebagai bagian dari pemerintah seyogyanya juga bersifat adaptif, yaitu mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan yang ada sehingga dapat menampilkan informasi yang aktual, faktual dan konten yang menarik. Humas bukan sekedar *media relation*, tetapi juga dituntut untuk memahami seluruh proses bisnis yang ada dalam institusi pemerintah dimana Humas berada. Sebagai contoh: Humas di Kementerian Keuangan dituntut untuk memahami bagaimana proses bisnis pengelolaan pajak, utang, anggaran, perbendaharaan, asset negara, dll.

## 5. Membuat kebijakan komunikasi yang kolaboratif

Kolaborasi diartikan sebagai bentuk kerjasama, interaksi, kompromi beberapa elemen terkait baik individu, lembaga atau pihak-pihak yang terlibat secara langsung dan tidak langsung yang menerima akibat dan manfaat (Haryono, N., 2012:48).

Humas pemerintah tidak dapat membuat konten informasi yang kredibel (didukung data dan fakta yang tepat) tanpa melibatkan unit pembuat kebijakan. Untuk itu, Humas harus berkolaborasi dengan unit pemerintah lain sebagai sumber kebijakan dalam membuat suatu konten informasi.

## 6. Isi informasi adalah terpenting (*content is the king*)

Hal terakhir yang tidak kalah penting adalah isi informasi yang akan disampaikan ke masyarakat. Peran Humas saat ini adalah sebagai seorang *producer* sekaligus *publisher*. PR sebagai *producer* yakni membuat berita, cerita, artikel, konten dan pastinya konten-konten yang taktis. Humas

dituntut untuk dapat membuat konten informasi yang menarik. Konten yang dapat menyentuh hati masyarakat, menjadi *top of mind* masyarakat. Dengan adanya konten yang menarik tersebut akan menjadi ikatan dalam daya ingat masyarakat akan kualitas dari institusi. Selain itu, para pekerja Humas juga merupakan *publisher*.

Humas saat ini tentu tidak hanya berkuat pada media *mainstream* saja, tapi sudah merambah ke dunia maya yang tidak memiliki batas teritori. Awak Humas juga dituntut untuk kreatif dan inovatif agar dapat menciptakan konten yang berkualitas dan menarik.

### PERLUNYA MEMBANGUN SDM HUMAS

Pengembangan SDM komunikasi pemerintah tentu merupakan hal yang sangat penting. Pembangunan SDM humas ini merupakan prasyarat dalam mendukung perwujudan *think ahead*. Awak Humas diharapkan mampu berpikir strategis layaknya pemimpin redaksi dalam merencanakan dan membuat *framing* pemberitaan terkait dengan apa yang telah, sedang dan akan dikerjakan oleh K/L. Selain itu, Humas juga mampu menetapkan berbagai *channeling* yang akan digunakan dan target *audience* yang akan disasar dengan mendasarkan pada monitoring media merujuk pada *keyword* tertentu melalui *google alert*.

Ibarat sebuah paduan suara dan simfoni orkestra, harmonisasi pengelolaan komunikasi pemerintah sangatlah penting, mengingat banyak topik, agenda dan kegiatan yang memerlukan pengelolaan yang terintegrasi dan terkoordinasi dengan baik, konsistensi dan kejelasan dalam agenda setting serta narasi tunggal menjadi isu strategis yang perlu terus ditangani secara profesional sehingga dapat berkontribusi dalam membangun *image* positif tentang kinerja pemerintah.

Kita tentunya berharap Humas di era digital akan semakin meningkatkan kualitas dan responsif dalam berkomunikasi. Tujuan utamanya guna menciptakan persepsi positif dalam membangun kepercayaan (*trust*) dari masyarakat. Harapannya efektifitas agenda-agenda pembangunan yang tersebar di berbagai K/L pemerintah dapat terus dipacu sebagai jawaban terhadap peningkatan kesejahteraan rakyat Indonesia.

KRISTIAN AGUNG PRASETYO  
DOSEN POLITEKNIK KEUANGAN NEGARA STAN

# SENGSARA SEBELUM NIKMAT: ORDEAL MECHANISM DALAM PENYALURAN PERTALITE

Beberapa waktu belakangan ini kita disuguhi berita-berita bagaimana sulitnya bertemu dengan makhluk yang bernama pertalite. Seperti yang kita paham selama ini, pertalite itu adalah makhluk yang baik hati bagi kita semua. Tanpa makhluk yang satu ini niscaya kita banyak yang secara signifikan bertambah miskin, khususnya Anda yang menggunakan kendaraan roda empat. Dahulu selain pertalite juga ada premium. Jenis yang satu ini sering di-*bully* karena dianggap sebagai anak nakal yang selalu bikin kotor. Bukan hanya sering bikin polusi udara parah, namun juga konon dapat membuat mesin kendaraan, terutama kendaraan modern dengan kompresi tinggi, berpotensi rontok.

Namun dia juga paling disuka masyarakat sudra karena harganya yang murah. Tentu saja bukan karena bensinnya yang mudah. Harga aslinya sih sebenarnya tinggi, namun karena disubsidi pemerintah, harganya jadi lebih murah. Masalahnya, karena harganya (menjadi) murah, maka tentunya banyak orang yang mau beli, khususnya kaum dhuafa dan kaum *mendang-mending*. Bagi orang seperti ini yang penting kendaraan jalan dengan ongkos yang semurah mungkin. Banyak sekali orang yang sifatnya seperti ini, saya salah satunya. Akibatnya uang yang harus dikeluarkan untuk nombokin premium makin lama makin besar. Pemerintah mau

tidak mau pikir karena tidak mungkin uang pajak habis semuanya dipakai untuk dibakar.

Untuk menyiasatinya, dibuatlah apa yang disebut dengan pertalite. Sebenarnya Pertamina sudah mempunyai produk yang zonder subsidi, yaitu keluarga pertamax dengan RON tinggi, terutama untuk kendaraan modern berkompresi tinggi. Karena tanpa timbal dan RON tinggi, maka keluarga pertamax ini lebih bersih. Hanya saja ya ada harga ada rupa. Keluarga pertamax harganya lebih mahal karena tidak ada subsidi. Kaum *mendang-mending* banyak yang tidak terlalu suka. Alhasil Pertamina menciptakan produk yang namanya pertalite. Barang ini relatif lebih murah dibandingkan keluarga pertamax namun tidak ada subsidi seperti premium. Alhasil harganya naik turun menyesuaikan dengan fluktuasi harga minyak dunia. Pasokan premium lambat laun dikurangi sampai akhirnya tidak dijual lagi oleh Pertamina.

*Fast forward* ke 2022. Ini adalah era yang menurut saya seperti *roller coaster*. Gejolak diawali dengan pandemi COVID-19 pada Maret 2020. Berbagai pembatasan yang dilakukan hampir seluruh negara di dunia membuat *supply chain* barang mengalami gangguan. Aliran barang, termasuk minyak bumi, dari satu wilayah ke wilayah lain tidak lagi lancar. Jika ada jumlahnya

pun terbatas. Memang ada penurunan lalu lintas manusia, namun secara umum tidak signifikan. Alhasil harga minyak dunia perlahan naik. Nah, karena keluarga perta, pertamax dan pertalite, sudah tidak ada subsidi, maka harganya ikut naik juga. Kenaikan semakin menjadi-jadi ketika pada awal 2022 Rusia menyerang Ukraina. Perlu diketahui bahwa Rusia itu salah satu produsen minyak mentah utama dunia. Rusia itu adalah penghasil minyak mentah nomor tiga terbesar di dunia setelah Amerika Serikat dan Saudi Arabia. Laman IEA (*International Energy Agency*) mencatat bahwa pada Januari 2022, Rusia menghasilkan 11,3 juta barrel per hari. Lebih dari 60% produksi minyak Rusia ini diekspor, terutama ke negara-negara Eropa. Memang ketika Rusia menyerang Ukraina, produksi minyak mereka tidak mengalami penurunan. Akan tetapi perang antara kedua negara ini diikuti kenaikan harga minyak mentah dari USD 8 bbl menjadi USD 105 bbl. Penyebabnya adalah adanya kekhawatiran sanksi ke Rusia yang mungkin dapat mengurangi ekspor minyak mentah mereka. Sampai sekarang kelihatannya belum ada tanda-tanda penurunan harga minyak dunia.

Ah itu kan perang jauh di Eropa sana. Kita di Indonesia *mah* aman. Tidak semudah itu, *Ferguso*. Sekarang ini jarak sudah bukan lagi menjadi isu utama. Dunia ini sudah menjadi datar kata Thomas

Friedman. Apalagi Indonesia sekarang ini sudah menjadi *net importer* minyak. Jika belinya saja sudah mahal, masak jualannya harus murah? Siapa yang harus *nombokin*? Tapi mau tidak mau negara memang harus *nombok*. Ini karena semua golongan menggunakan bahan bakar minyak. Jika dibiarkan berfluktuasi mengikuti harga pasar global, maka akibatnya bisa merembet ke inflasi. Mau tidak mau ini tidak boleh dibiarkan. Oleh karenanya pemerintah memutuskan untuk melakukan subsidi atas pertalite mulai Maret 2022. Makanya sampai sekarang pertalite masih setia di angka Rp 7.600 per liter. Padahal bensin setara itu di SPBU milik Vivo harganya sudah Rp 9 ribu lebih. Apalagi jika dibandingkan dengan harga bensin bernama Shell Super yang mencapai Rp 17 ribu lebih per liter, jelas pertalite jauh lebih murah.

Kaum *mendang-mending* yang naik LCGC, yang sebenarnya mampu beli bensin Shell, tentunya bersemangat untuk pindah ke pertalite. Masalahnya adalah, kaum bermobil ini sebenarnya tidak layak untuk menengadahkan tangan mengemis minta subsidi ke pemerintah. Mereka itu punya mobil, jelas pada kondisi yang tidak selayaknya diberikan bantuan. Bahkan di buku manual mobil mereka itu bensin yang seharusnya dipakai minimal berjenis setara pertamax. Tuntutan kompresi mesin mobil modern memang seperti itu. Biarlah jatah bensin subsidi untuk mobil *pick up* milik tukang sayur keliling atau motor pengangkut hantaran gas dan air botolan. Dengan kata lain pemberian subsidi ini harus tepat sasaran.

Perkara ini lebih mudah ditulis dibandingkan dengan dilaksanakan. Masalah sulitnya penyaluran subsidi ke sasaran yang paling tepat itu bukanlah hal yang baru. Saya kita Indonesia menjadi banyak contoh terjadinya subsidi yang salah sasaran. Akhir Juli lalu misalnya ada berita bahwa banyak ASN dan

anggota TNI/Polri yang memperoleh kiriman bantuan langsung tunai sebesar Rp 600 ribu. Padahal bantuan ini sebenarnya khusus untuk pelaku UMKM saja. Biasanya kesalahan-kesalahan ini disebabkan oleh adanya basis data penerima manfaat yang kurang, atau tidak, akurat. Ini kendala klasik di negara tercinta ini. Oleh karenanya tantangan Pertamina adalah bagaimana caranya supaya mereka yang membeli pertalite, atau BBM subsidi lainnya, adalah konsumen yang benar-benar layak. Jangan sampai uang rakyat dinikmati oleh mereka yang tidak berhak. Lalu bagaimana caranya?

Beberapa ide sudah pernah dicoba. Yang sekarang sedang berlangsung adalah penggunaan aplikasi berbasis *mobile* untuk melacak kemampuan ekonomis konsumen guna menentukan layak tidaknya mereka memperoleh hak membeli pertalite. Tentu saja cara ini mahal dan membutuhkan sumber daya yang tidak bisa dibilang sedikit. Adakah cara lain yang lebih murah? Ada dong. Para ahli ekonomi menyebutnya dengan *ordeal mechanism*.

Ide dasarnya relatif sederhana. Kita tahu bahwa selama ini kendala utama penyaluran subsidi yang tepat sasaran adalah masalah basis data. Basis data penerima bantuan yang tidak akurat membuat kita sulit mengenali identitas mereka ini. Misalnya saja setahun lalu ada orang bernama Bunali yang kondisinya mampu karena bekerja jadi *engineer* di pabrik mobil Nissan. Namun sekarang Nissan sudah menutup pabriknya di Indonesia dan karenanya, nasih Bunali sebagai *engineer* ikut tutup. Tentu saja dalam basis data Bunali masih terekam sebagai *engineer* yang tidak perlu mendapat bantuan. Padahal senyatanya Bunali sekarang hidup merana tanpa penghasilan. Pemerintah banyak mengalami kesulitan dalam membuat basis data yang akurat seperti ini karena

data antar lembaga yang sering tidak sinkron.

Nah, bagaimana jika pendekatannya dibalik saja. Jadi alih-alih pemerintah mencoba mengenali apakah Bunali itu miskin atau tidak, bagaimana kalau sekarang Bunali yang secara proaktif mendeklarasikan dirinya sebagai orang susah. Orang pajak sudah lama mempraktikkan cara ini. Orang pajak tidak pernah tahu apakah seorang wajib pajak itu harus bayar pajak atau tidak. Dia tidak tahu apakah seorang pedagang kerupuk ber-*omzet* jumbo bernama Wonokairun itu penghasilannya besar atau tidak. Yang orang pajak lakukan adalah meminta Wonokairun untuk menulis, menggunakan formulir yang namanya SPT Tahunan, berapa duit yang dia peroleh dari dagang krupuk setiap tahun. Mereka juga sekaligus meminta Wonokairun menghitung dan membayar pajaknya di bank.

Nah, dengan logika yang sama, tentu bisa kita meminta Bunali untuk memberitahukan bahwa dia itu orang kurang mampu yang layak diberikan bantuan. Saya kira Bunali akan mau melakukan hal ini karena dia akan mendapatkan uang. Insentifnya besar. Jangankan orang yang akan dapat bantuan, bahkan orang yang akan kehilangan uang, dalam bentuk pajak, pun mau kok melakukan *self-declaration* (orang pajak menyebutnya dengan *self-assessment*). Untuk mendorong Bunali mau lapor diri, maka program bantuannya sendiri harus menarik buat kaum papa seperti Bunali dan tidak menarik bagi orang mampu. Oleh karenanya pemberian bantuan berupa uang tunai akan berpotensi membuat banyak orang menjadi tiba-tiba miskin. Akan tetapi jika bantuan serupa diwujudkan ke dalam bentuk beras kualitas bawah dengan antrian panjang, maka niscaya orang mampu, yang sebenarnya kuat

membeli beras pandan wangi, tidak akan ikut antri memperoleh jatah beras yang rasanya tidak enak. Jadi supaya bantuan tepat sasaran, orang seperti Bunali yang hidupnya sudah sulit, harus dibuat lebih sengsara lagi. Sekilas memang kejam dan seolah ada *paradox*, namun cara ini sukses untuk mengusir orang yang tidak berhak keluar dari antrian beras bantuan untuk kaum dhuafa.

Sekarang kembali ke pertalite. Ketika premium masih ada, saya sempat geli sendiri ketika berdiri di antrian premium di salah satu SPBU. Geli sekaligus sebal. Ini karena di depan saya ada wanita yang sedang mengisi premium ke dalam kendaraan tumpangnya. Jika saya mau mengisi premium di motor tua Suzuki Hayate, wanita di depan saya sedang menunggu sedan BMW seri 3 minum premium. Jelas dia tidak layak mengisi premium. Namun apa yang bisa dilakukan petugas SPBU? Tentu saja dia tidak mungkin menolak *customer*. Paling mudah, dan paling murah, adalah bagi Pertamina adalah dengan membuat antrian pembelian premium menjadi tidak menarik.

Prinsip ini bisa diterapkan untuk penjualan pertalite. Saya kira Pertamina tidak perlu membuat aplikasi MyPertamina beserta dengan segala infrastruktur yang diperlukan, mulai dari pembangunan aplikasi sampai dengan *basis data*, yang membutuhkan *capital expenditure* yang tidak sedikit. Akan lebih mudah, dan murah, bagi Pertamina untuk membuat antrian pertalite tidak menarik. Ini bisa dilakukan dengan misalnya mengurangi penggunaan dispenser yang khusus melayani pertalite. Jika sebelumnya misalnya ada tiga dispenser pertalite, kurangi menjadi satu saja. Ini

niscaya akan membuat antrian pertalite mengular panjang. Orang-orang yang lebih menghargai waktu tentu menjadi tidak sabar dan beralih ke pertamax. Bagi orang seperti Wonokairun, waktunya akan lebih baik dipakai untuk dagang krupuk daripada untuk antri pertalite. Bahkan bisa jadi dia akan pindah ke Shell atau BP yang dipercaya mempunyai bensin dengan kualitas lebih baik yang bisa dibeli nyaris tanpa antri. Hemat waktu. Yang tertinggal di antrian pertalite hanyalah mereka yang benar-benar memerlukan bensin berharga murah saja. Orang-orang seperti Bunali. Cara berbasis *ordeal mechanism* ini lebih murah, efisien, namun efektif dibandingkan dengan menggunakan aplikasi. Bagaimana pendapat Anda?

# Komunitas Kepel Melestarikan Lingkungan dengan Minim Sampah

ARTIKEL:  
ARIS WIDODO  
FOTO:  
DOK. KEPEL



Seiring dengan makin luasnya kesadaran akan pentingnya pelestarian lingkungan hidup, saat ini berkembang berbagai jenis komunitas pencinta lingkungan. Tak terkecuali di lingkungan Kementerian Keuangan. Komunitas pencinta lingkungan di lingkungan kementerian keuangan bernama Kepel. Komunitas ini awalnya dipelopori beberapa orang pegawai dan sekarang sudah banyak pegawai yang bergabung di komunitas Kepel. Bentuk kegiatan komunitas Kepel bermacam-macam, dari gerakan minim sampah di lingkungan rumah dan kantor, hingga berbagi ilmu serta bisa bertukar barang juga sehingga lebih bermanfaat.

Mengapa mereka tertarik mendirikan komunitas Kepel? Apa saja kegiatannya?

Komunitas Kepel sudah memiliki instagram dengan banyak followers, banyak informasi yang ada di sana sehingga kita bisa melihat kegiatan-kegiatan yang mereka lakukan. Komunitas Kepel ini menarik untuk diangkat dalam tulisan ini agar kita mengenal mereka lebih dalam.

Penulis berkesempatan melakukan wawancara dengan ketua Kepel Dwi Rezeki Kirana Bangun, biasa dipanggil Dwi, saat ini Dwi bertugas di Sekretariat Jenderal, sejak kapan komunitas Kepel didirikan dan mengapa menggunakan nama Kepel?

Kepel merupakan singkatan dari Komunitas Kemenkeu Pencinta Lingkungan. Komunitas ini diinisiasi oleh Daniar Prima, salah seorang pegawai BPPK yang tergerak untuk mengajak pegawai Kemenkeu lainnya untuk lebih peduli terhadap lingkungan. Kepel berdiri pada tanggal 26 Juni 2021. Kepel sendiri merupakan nama buah yang banyak ditemukan di Indonesia buahnya harum dan juga bermanfaat bagi kesehatan.

Selanjutnya ketika ditanya mengapa tertarik dengan lingkungan hidup, apa alasan dan tujuannya?, Dwi memberikan jawaban, mungkin banyak orang yang merasa isu lingkungan bukanlah isu yang

menarik. Padahal, kondisi lingkungan kita dari hari ke hari makin mengkhawatirkan. Tragedi TPA Leuwigajah di tahun 2005 yang menewaskan ratusan orang pada saat itu merupakan salah satu alasan bagi kita untuk lebih peduli terhadap lingkungan. Selain itu, di tahun 2021, Jakarta menghasilkan 7,2 ton sampah per harinya. Sebagian besar sampah-sampah tersebut berakhir di TPA dan juga laut dimana dapat membahayakan hewan-hewan laut. Selain itu, perubahan iklim, polusi udara, pencemaran air, dll membuat kami tergerak untuk fokus di bidang lingkungan. Kami berharap kami bisa meningkatkan awareness atas isu ini dan menjadi support system bagi para anggotanya. Selain itu, juga menambah ilmu terkait hidup minim sampah, membuat kompos, eco enzyme, membuat kreasi dari barang bekas, serta memberi tahu lokasi bank sampah di sekitar mereka. Kami berharap adanya perubahan gaya hidup dari para anggota dan memberikan contoh bagi orang sekitar.

Selain itu, Kemenkeu juga memiliki aturan SE-6/MK/2019 tentang Implementasi Eco Office di Lingkungan Kemenkeu yang memiliki 5 fokus yaitu:

1. Pengurangan sampah plastik dan kertas
2. Penghematan energi listrik
3. Penghematan penggunaan air
4. Kebersihan ruang kerja/kenyamanan ruang kerja
5. Pengelolaan sampah

Kami juga kerap berkolaborasi dengan Eco Office Kemenkeu untuk mensosialisasikan SE tersebut sehingga eco office bisa dilaksanakan di seluruh kantor Kemenkeu.

Melihat jawaban Dwi tersebut, kita mulai memahami bahwa komunitas Kepel ternyata memiliki tujuan mulia supaya kita memiliki awareness atas isu lingkungan dan mengubah gaya hidup serta menjadi contoh bagi orang sekitar, keren ya komunitas Kepel. Awalnya

penulis berpikir nama Kepel adalah singkatan dari Kemenkeu Pencinta Lingkungan ternyata Kepel adalah nama buah yang harum dan juga bermanfaat bagi kesehatan. Wah, saya langsung berpikir besok ke pasar beli buah Kepel. Apakah kalian pernah makan buah Kepel, yuk kita makan buah Kepel dan rasanya seperti apa kira-kira, buah Kepel baik bagi kesehatan jadi harus membiasakan konsumsi buah tersebut, kalau perlu kita budidayakan supaya buah Kepel tetap lestari di Indonesia.

Saya juga menanyakan berapa anggotanya sekarang? Siapa saja yang bisa menjadi anggotanya? Apakah hanya untuk pegawai Kemenkeu atau orang luar bisa ikut? Ada syarat tertentu untuk menjadi anggota?, Dwi memberikan jawaban saat ini ada 261 anggota Kepel yang merupakan pegawai Kemenkeu dari seluruh Indonesia. Untuk menjadi anggota hanya perlu mengisi formulir di [bit.ly/kepel2022](https://bit.ly/kepel2022). Kami terbuka untuk seluruh pegawai Kemenkeu yang ingin belajar tentang hidup minim sampah, karena seluruh anggota sama-sama belajar dan berbagi ilmu yang mereka miliki. Untuk instagram, kami memiliki akun dengan nama @kepelkemenkeu dengan jumlah 891 followers yang terbuka untuk umum, di situ kami membagikan informasi dan ilmu terkait hidup ramah lingkungan.

Dwi juga menceritakan bagaimana awal mendirikan komunitas Kepel, bagaimana bertahan hingga sekarang, apa saja kendalanya selama ini. Komunitas Kepel berdiri atas inisiasi Daniar Prima yang berusaha mengajak teman-teman pegawai Kemenkeu yang berminat di bidang lingkungan. Dari situ, dilakukan pembentukan tim inti yang disebut Kepel Squad, yang merupakan pengurus Komunitas Kepel. Lalu Kepel membuat WAG yang berisi pegawai Kemenkeu. Kendala yang dihadapi adalah kesibukan masing-masing para pengurus. Namun demikian, kami berusaha untuk tetap melaksanakan program kerja Kepel yang sudah dibuat di awal tahun. Para pengurus berusaha untuk membagi waktunya. Kepel berusaha terus aktif berinteraksi dengan anggota Kepel di WAG dengan

membagikan kegiatan-kegiatan atau workshop dan seminar yang dapat diikuti oleh anggotanya.

Apa manfaat yang dirasakan setelah menjadi anggota komunitas Kepel? Dwi memberikan jawaban Kepel hadir sebagai sebuah support system. Hidup ramah lingkungan bukanlah hal yang dijalankan hanya satu hari saja. Sebisa mungkin kita menjadikannya sebagai gaya hidup dan dilakukan terus-menerus. Namun, kadang kita merasa lelah untuk melakukan hal itu setiap hari. Di sinilah Kepel menjadi wadah untuk saling berbagi dan terus belajar terus-menerus agar bisa konsisten terus melaksanakan gaya hidup minim sampah.

Setelah mengenal lebih dalam komunitas Kepel ini, saya jadi termotivasi untuk menyebarkan komunitas ini di kantor agar para pegawai yang minat dengan isu lingkungan bisa bergabung dengan Kepel. Komunitas ini memiliki tujuan yang mulia sehingga harus kita sebarkan di kantor-kantor kementerian keuangan, termasuk kantor anda, sebarkan komunitas Kepel ini kepada pegawai di kantor anda.

Bagaimana komunitas Kepel menjalankan prinsip hidup minim sampah, seperti apa pelaksanaannya baik di rumah maupun di kantor, misalnya setiap belanja bawa kantong atau wadah sendiri, meminimalkan sampah plastik, tidak membeli barang dalam kemasan, mengolah kembali sampah organik, dll. Dwi menjelaskan bahwa hidup minim sampah dapat dilakukan dengan melakukan audit sampah di rumah masing-masing, kita dapat melihat sampah apa saja yang paling banyak kita produksi, dari situ kita bisa mulai mengurangi dan menolak barang-barang yang dapat berpotensi menjadi sampah. Seperti sedotan sekali pakai, kantong kresek, dll. Lalu setelah itu kita bisa mulai mengelola sampah organik dengan membuat kompos atau mengikuti program Kompos Kolektif yang ada di area rumah masing-masing. Kita juga bisa mulai belanja kebutuhan sehari-hari dengan membawa wadah sendiri. Setelah itu, kita bisa mulai mencari bank



[LIVE] - Webinar Green Lifestyle : Insan Kemenkeu Cinta Tanaman dan Lingkungan Hidup

sampah di sekitar kita, sampah-sampah bisa didaur ulang dan diupcycle menjadi barang yang lebih berguna. Banyak sekali lembaga yang menerima barang-barang yang sudah tidak terpakai, seperti sampah elektronik, masker, baju dan sepatu bekas, dll. Di komunitas inilah biasanya para anggota berbagi terkait hal-hal tersebut.

Selanjutnya saya menanyakan kegiatan komunitas Kepel, apa saja kegiatannya, bagaimana mereka melakukan kegiatan tersebut? Dwi memberikan jawaban kegiatan Kepel berfokus di sosial media dan Whatsapp Group. Kegiatan Kepel adalah untuk meningkatkan kesadaran kepada anggota untuk lebih sadar akan pentingnya menjaga lingkungan. Kepel aktif melakukan kampanye di sosial media, yaitu Instagram, berdiskusi dengan sesama anggota terkait hidup ramah lingkungan dan minim sampah. Selain itu Kepel juga mempunyai program bernama Kepel Bagi Ilmu, yaitu webinar terkait lingkungan, seperti pembuatan eco enzyme, eco office di lingkungan Kemenkeu. Selain itu, Kepel juga meramaikan Hari Oeang RI berkolaborasi dengan Yuk Berkebun Kemenkeu dengan membuat webinar yang turut mengundang Ibu Susi Pujiastuti, Bapak Haryo Damar, dan Ibu Britania Sari praktisi hidup minim sampah. Selain itu, Kepel juga memiliki program bernama

Kepel Swap, dimana para anggota dapat menghibahkan barang, atau menjual barang mereka yang sudah tidak terpakai kepada anggota lain dengan tujuan memperpanjang umur barang dan tidak dan mengurangi sampah yang berakhir di TPA.

Gimana, setelah mengetahui kegiatan komunitas Kepel di atas, anda tertarik tidak, kegiatan mereka banyak sekali sehingga kita bisa bergabung tidak hanya masalah sampah tetapi ada kegiatan berbagi ilmu juga, bisa bertukar barang juga sehingga lebih bermanfaat. Anda bisa bergabung melalui [bit.ly/kepel2022](https://bit.ly/kepel2022), follow juga instagram mereka.

Di mana dan kapan kegiatan Kepel dilaksanakan, hari apa biasanya komunitas Kepel berkumpul secara rutin? Dwi menjelaskan Kegiatan masih berpusat pada WAG dan webinar yang dilakukan secara online, kegiatan dilakukan setiap 3 bulan sekali untuk Kepel Bagi Ilmu. Untuk kegiatan Kepel Swap dilaksanakan setiap hari Sabtu dan Minggu. Di HORI yang lalu, Kepel juga ikut melakukan aksi tanam pohon di Lapangan Bea Cukai, yang turut dihadiri oleh Ibu Menteri dan jajaran Eselon I dan pegawai Kemenkeu lainnya. Selain itu, Kepel juga pernah melakukan aksi Kepel Bagi Pohon dalam rangka merayakan Hari Lingkungan

Hidup, ada 163 pohon yang ditanam oleh para pegawai Kemenkeu. Selain itu, Kepel juga pernah mengadakan lomba pembuatan video dan poster dengan tema terkait lingkungan yang diikuti oleh umum. Kepel juga aktif untuk hadir di media-media Eselon I, seperti Loker BPPK, Bincang Pagi DJPK, Kanal BC, acara komunitas muslimah, dll untuk berbagi ilmu terkait lingkungan.

Dwi juga menjelaskan salah satu kegiatan Kepel adalah mengelola sampah, seperti apa Kepel mengelolanya, apakah dalam bentuk pembuatan kompos, hasilnya disalurkan ke mana, dijual atau dikasih gratis. Saat ini Kepel tidak melakukan pengelolaan sampah. Namun kami berusaha untuk mengedukasi para anggota untuk mengelola sampah organiknya menjadi Kompos atau ecoenzyme. Dan untuk sampah anorganik dapat disalurkan ke bank sampah dan lembaga pengelola sampah lainnya yang dapat didaur ulang sehingga sampah tidak berakhir di TPA atau laut.

Terakhir, sebelum saya mengakhiri wawancara dengan Dwi selaku ketua Kepel, saya ingin tahu bagaimana prospek komunitas Kepel ke depan? Menurut Dwi Kepel akan terus berusaha untuk berbagi ilmu dengan para anggota. Kepel juga berharap ingin melakukan acara offline dimana anggota Kepel bisa bertemu secara langsung dan melakukan workshop secara fisik seperti pembuatan kompos, dll. Namun, karena anggota yang masih berada di seluruh Indonesia, Kepel saat ini masih fokus di online saja.

Salah satu pegawai kementerian keuangan, Muthia Permatasari mengungkapkan manfaat dari kegiatan komunitas Kepel. Menurutnya Manfaat yang dirasakan dari kegiatan komunitas kepelkemenkeu ini adalah dia pernah mengikuti Workshop Gaya Hidup Minim Sampah tahun 2021 lalu yang diadakan oleh Komunitas Muslimah Kemenkeu (saat ini bernama Women Islamic Studies Hub) bersama Kepel. Pada webinar tersebut ada tiga narasumber yang masing-masing menjelaskan tentang Gaya Hidup Minim Sampah (GHMS), Bank

Sampah, dan Cara Mengolah Sampah Organik. Setelah mengikuti workshop tersebut, dia merasa lebih aware dengan Gaya Hidup Minim Sampah. 3 Langkah untuk memulai GHMS adalah 3 AH yaitu Cegah, Pilah dan Olah. Langkah mencegah sampah masuk ke dalam rumah/kos adalah hal yang sebisa mungkin senantiasa saya lakukan. Hal ini bisa dipraktikkan dengan membawa totebag saat ingin berbelanja dan membawa kotak makan untuk membeli makan di warung makan.

Lebih lanjut, Muthia Permatasari juga mengungkapkan sebagai followers akun instagram @kepelkemenkeu, dirinya merasa akun tersebut sangat informatif karena aktif membagikan informasi seputar lingkungan dan minim sampah seperti Budaya 5R (Refuse, Reduce, Reuse, Recycle, ROT), 5 Langkah Mencintai Bumi, Fruit Rescue, dan Sustainable Living Tips. Dia juga pernah melihat Kepel mengadakan semacam campaign Kepel Menanam dengan tagline "Teduhkan Lingkungan, Bersihkan Udara" dalam rangka menyambut Hari Lingkungan Hidup Sedunia pada tanggal 5 Juni. Campaign tersebut dilakukan dengan membagikan bibit kepada pegawai Kemenkeu di beberapa titik di kantor pusat seperti Lapangan Banteng, Kantor Pusat DJP, DJBC, Sekretariat BPPK, Pusdiklat Pajak, dan PKN STAN. Selain diambil secara on the spot, Kepel juga memberikan alternatif opsi pengiriman bibit dan gratis ongkir untuk 20 pendaftar pertama. Nantinya bibit yang dibagikan tersebut, ditanam oleh masing-masing pegawai untuk kemudian didokumentasikan sebagai aksi nyata dalam menjaga lingkungan.

Keren ya komunitas Kepel, ayo sebarkan komunitas ini kepada pegawai di kantor anda dan social media anda. Pegawai kementerian keuangan di seluruh Indonesia agar mengetahui keberadaan komunitas ini dan bergabung dalam kegiatan mereka. Mari kita untuk lebih peduli terhadap lingkungan agar tetap lestari.



FOTO: SATRIYO ESTU ANGGORO &amp; DOK. KEPEL

MIKHAEL YUDHA DAMARA PURBA  
ALUMNI UNIVERSITY OF WASHINGTON

# BELAJAR BUKAN SEMBARANG BELAJAR DI NEGERI PAMAN SAM



*Saya tidak hanya belajar secara akademik, tetapi saya juga belajar tentang kehidupan. Saya belajar dan mengamati bagaimana aspek-aspek baik di negara tempat saya belajar ini juga dapat diterapkan di Indonesia dengan tidak meninggalkan nilai-nilai khas bangsa Indonesia.*

“...but in this world, nothing can be said to be certain, except death and taxes.”

- Benjamin Franklin

Kutipan dari surat salah seorang *founding father* Amerika Serikat, Benjamin Franklin kepada ilmuwan Perancis, Jean-Baptiste Le Roy inilah yang menjadi pengiring langkah saya menapaki karir sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) di Direktorat Jenderal Pajak, Kementerian Keuangan Republik Indonesia sejak tahun 2012. Peranan pajak yang sangat vital dalam pembiayaan dan pembangunan negara ini membuat kutipan di atas menjadi semakin relevan. Hal ini mendatangkan perasaan bangga tersendiri di diri saya karena saya dapat berkontribusi langsung dalam upaya negara mengumpulkan penerimaan negara.

Sembilan tahun berselang, setelah menyelesaikan pendidikan strata satu melalui izin belajar, saya diberikan kesempatan untuk mengikuti salah satu program beasiswa yang menurut pandangan orang-orang di Kementerian Keuangan sebagai program beasiswa yang paling sulit mengingat banyaknya tahapan yang harus dilalui untuk menjadi *awardee*, yaitu *Ministerial Scholarship* (MINTS). Tahapan yang harus dijalani terdiri dari tes potensi akademi, tes kemampuan bahasa Inggris, penulisan esai, tes psikologi, dan wawancara.

Sebelum terpilih menjadi salah satu *awardee* dari MINTS, saya terlebih dahulu melakukan pendaftaran ke beberapa universitas dengan harapan setelah mendapatkan beasiswa, saya dapat langsung berangkat untuk studi. Bak gayung bersambut, saya mendapatkan beberapa *Letter of Acceptance* (LOA) dari universitas-universitas yang saya daftar dan salah satunya adalah Program *LL.M in Taxation* dari *University of Washington*, Seattle, Amerika Serikat. Hal ini

FOTO : DOK. PRIBADI



menjadi modal berharga bagi saya dalam menghadapi tes akhir di MINTS, yaitu tes wawancara. Di tes wawancara tersebut, saya berhasil meyakinkan tim penguji bahwa saya sudah berhasil masuk salah satu universitas berperingkat 30 besar dunia dan siap untuk berangkat di tahun yang sama. Setelah resmi menjadi *awardee* dari MINTS, saya pun bersiap diri untuk memulai salah satu perjalanan hidup yang paling monumental bagi saya.

Amerika Serikat adalah negara yang menjadi kiblat pendidikan dunia dan negara acuan peradaban dengan kota Seattle sebagai salah satu kota metropolitannya. Saya tidak pernah membayangkan akhirnya akan menginjakkan kaki dan belajar di negara adidaya ini. *Admission team* dari *University of Washington* berperan sangat besar bagi saya dan keluarga dalam proses kepindahan dan adaptasi saya di negeri Paman Sam ini. Saya dan keluarga tinggal di sebuah apartemen yang berada di kompleks perumahan milik universitas dengan harga yang jauh berada di bawah harga pasar. Hal ini membuat fokus saya menjadi tidak terpecah karena di saat yang sama saya sudah harus melaksanakan program orientasi dan perkuliahan.

Semesta mendukung. Itulah mungkin frasa yang paling tepat untuk menggambarkan bagaimana sistem pendidikan di Amerika Serikat dibentuk sedemikian rupa untuk mendukung kenyamanan mahasiswa dalam belajar untuk mencapai kelulusan. Adanya *office hour* memungkinkan mahasiswa dalam meminta bimbingan atau mentoring secara pribadi (*one-on-one*) kepada pengajar sehingga arah bimbingan lebih tepat sasaran. Perkumpulan mahasiswa internasional juga menjadi wadah yang efektif dalam berbagi informasi dan diskusi bagi mahasiswa seperti saya untuk beradaptasi lebih cepat dalam kehidupan kampus. Di sisi lain, adanya fasilitas olahraga seperti stadion pertandingan, pusat kebugaran, dan lapangan berbagai cabang olahraga memberikan saya akses yang luas untuk menjaga fisik saya menghadapi perubahan musim. dan

klinik gratis yang memberikan layanan kesehatan, vaksinasi, hingga konsultasi psikologi yang tersedia juga menjadi pelengkap yang menjadikan sistem ini berjalan dengan sangat baik.

Selama satu tahun berkuliah dan menjalani perkuliahan di *University of Washington*, saya menjalani hidup yang sangat menyenangkan dan penuh warna. Di kampus, saya berkesempatan untuk bertemu dengan teman-teman kuliah yang berasal dari negara, latar belakang pendidikan, dan kebudayaan yang beraneka ragam. Salah satu hal yang paling berkesan bagi saya selama menjalani perkuliahan adalah sistem pendukung yang berada di sekitar saya. Saya yang berasal dari disiplin ilmu yang berbeda sebelumnya (S1 Akuntansi), diberikan pendampingan, baik oleh rekan kuliah, maupun dari para pengajar. Saya dijelaskan secara mendetail bagaimana struktur dan penyusunan hukum dapat terbentuk dan bagaimana penerapannya dalam tatanan kehidupan masyarakat.

Sebelum setiap pertemuan, mahasiswa diminta untuk membaca bahan yang telah disiapkan sebelumnya dan menyusun pertanyaan atau argumen untuk dibahas bersama di kelas. Bahan yang dimaksud dapat berbentuk modul ajar, buku cetak, peraturan, atau bahkan putusan pengadilan. Dengan demikian, proses belajar mengajar menjadi sangat efektif karena dalam pertemuan di kelas, setiap mahasiswa sudah memiliki pengetahuan tentang materi yang akan dibahas dan pengajar lebih berperan sebagai fasilitator atau pengarah dari diskusi yang berjalan. Selain itu, setiap pendapat yang disampaikan oleh mahasiswa dalam proses perkuliahan selalu dipertimbangkan dan dijelaskan mengapa pendapat itu menjadi relevan atau tidak dalam diskusi.

Selain itu, hal berkesan lainnya adalah tingginya integritas dari para mahasiswa di universitas ini. Dalam minggu ujian, setiap mahasiswa diberikan waktu satu minggu untuk melaksanakan ujian tanpa ada jadwal secara spesifik. Sebagai contoh, saya bisa melaksanakan ujian mata kuliah A di hari senin dan mata kuliah



B di hari rabu. Sementara itu, rekan lain juga dipersilakan melaksanakan ujian B di hari selasa dan ujian A di hari kamis. Kepercayaan yang diberikan oleh pihak universitas kepada mahasiswa menjadi bukti nyata integritas yang sudah menjadi budaya yang mengakar dalam sistem pendidikan di Amerika Serikat.

Sementara itu, dalam hal kehidupan sehari-hari, saya juga tidak kalah takjub dengan hal yang terjadi bagi saya dan keluarga. Pemerintah federal Amerika Serikat, pemerintah negara bagian Washington, dan pemerintah Seattle menghadirkan berbagai program yang membantu dan memudahkan kehidupan kami selama tinggal di negara tersebut. Istri saya mendapatkan pekerjaan sebagai guru sekolah anak usia dini di kota Seattle setelah sebelumnya mendapatkan izin kerja dari pemerintah federal. Selain itu, anak saya juga dapat bersekolah

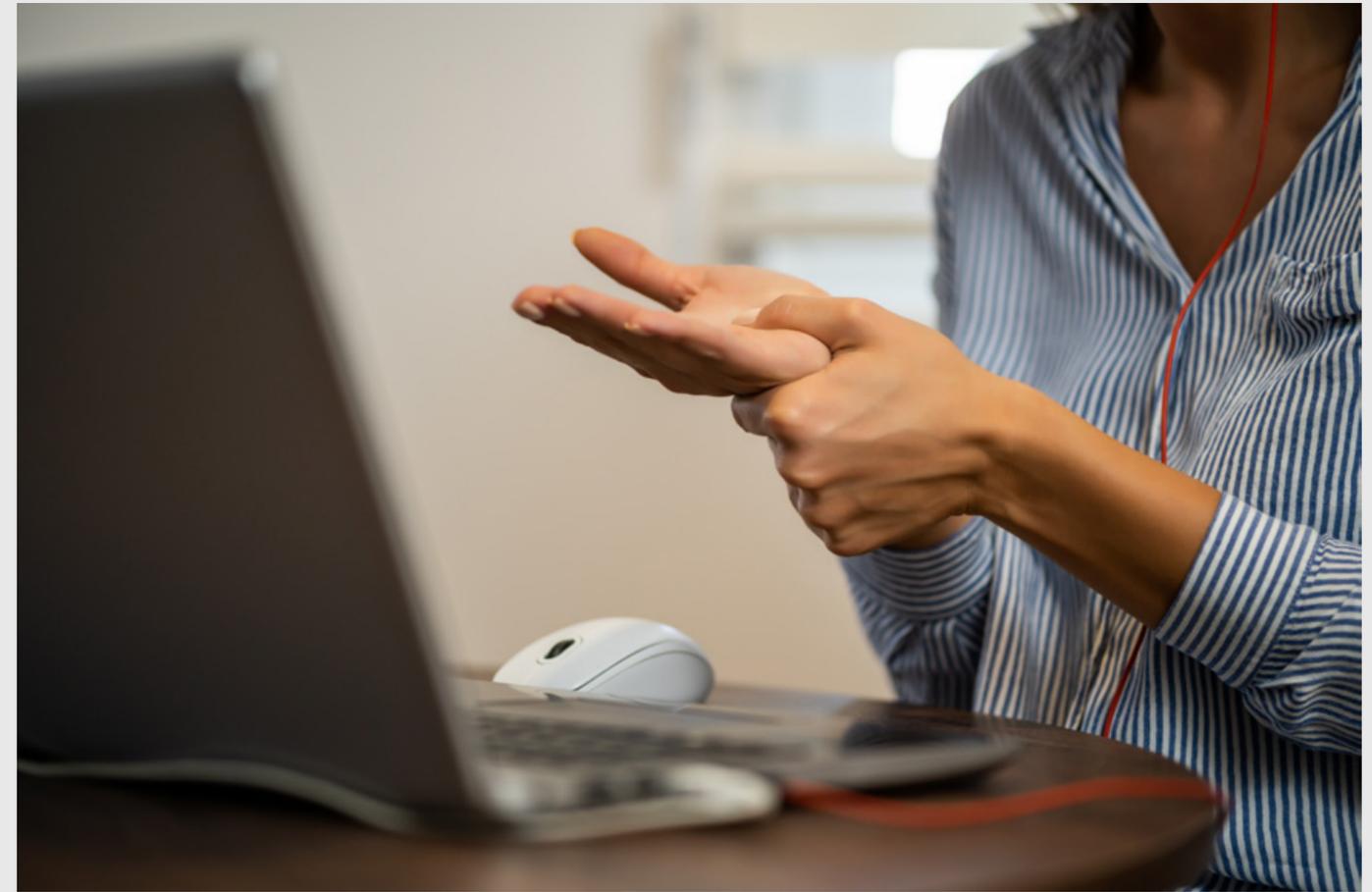
di Seattle dengan mendapat insentif penuh dari pemerintah negara bagian dan pemerintah kota. Hal-hal ini tentu sangat menggembirakan karena selain saya diberikan kesempatan sekolah di luar negeri, istri saya mendapatkan eksposur bekerja di luar negeri, dan anak saya juga dapat merasakan pendidikan Amerika Serikat dengan teman-teman yang beragam pula.

Sepanjang saya tinggal di Amerika Serikat, saya melihat infrastruktur yang sangat maju, pembangunan sumber daya manusia yang terintegrasi dan terfokus, serta kehidupan demokrasi yang sudah matang. Pada saat itu, hanya satu hal yang terbersit di benak saya. Saya memimpikan Negara Indonesia, pada masa yang saya harap tidak terlalu lama lagi, akan berada pada titik yang sama dengan negara Amerika Serikat dalam hal-hal tersebut. Saya berharap hasil pendidikan saya di Amerika

Serikat ini dapat digunakan sebagai bagian dari solusi atas permasalahan bangsa.

Akhirnya, belajar memang bukan sembarang belajar di Negeri Paman Sam. Saya tidak hanya belajar secara akademik, tetapi saya juga belajar tentang kehidupan. Saya belajar dan mengamati bagaimana aspek-aspek baik di negara tempat saya belajar ini juga dapat diterapkan di Indonesia dengan tidak meninggalkan nilai-nilai khas bangsa Indonesia. Hal ini tidak mungkin terjadi jika tidak karena beasiswa dari pemerintah Indonesia dan kepercayaan rakyat Indonesia untuk memberikan kesempatan ini bagi saya. *And to you, Ministry of Finance of the Republic of Indonesia, I will forever be in your debt.*

FOTO : DOK. PRIBADI



ARIMBI PUTRI

## SEBELUM TERLAMBAT, JANGAN SEPELEKAN RASA NYERI PADA PERGELANGAN TANGAN

*Aw, kok pergelangan tangan saya sakit kalau digerakkan ya? Mungkin bukan sesuatu yang serius ya, nanti juga sembuh sendiri.*

**E**its, nyeri di otot, urat, persendian, seringkali dianggap sepele dan terabaikan. Akan tetapi, hal tersebut bisa menjadi masalah yang serius apabila tidak segera ditangani. Seperti yang baru saja saya alami, sekira enam bulan sebelum artikel ini ditulis, saya merasakan nyeri di bagian pergelangan dan otot lengan, yang terkadang bisa dirasakan sampai ke lengan bawah. Saya menganggapnya sepele dan membiarkannya hingga berbulan-bulan sampai akhirnya rasa nyeri tersebut sudah tak tertahankan.

Setelah berkonsultasi dengan tenaga medis, dokter mendiagnosis saya terkena sindrom *De Quervain's tenosynovitis*. Sindrom ini tak jarang menyerang pegawai yang erat berhubungan dengan penggunaan gawai, laptop, mouse, dan kegiatan yang lebih banyak menitikberatkan pada daerah sekitar tangan dan lengan.

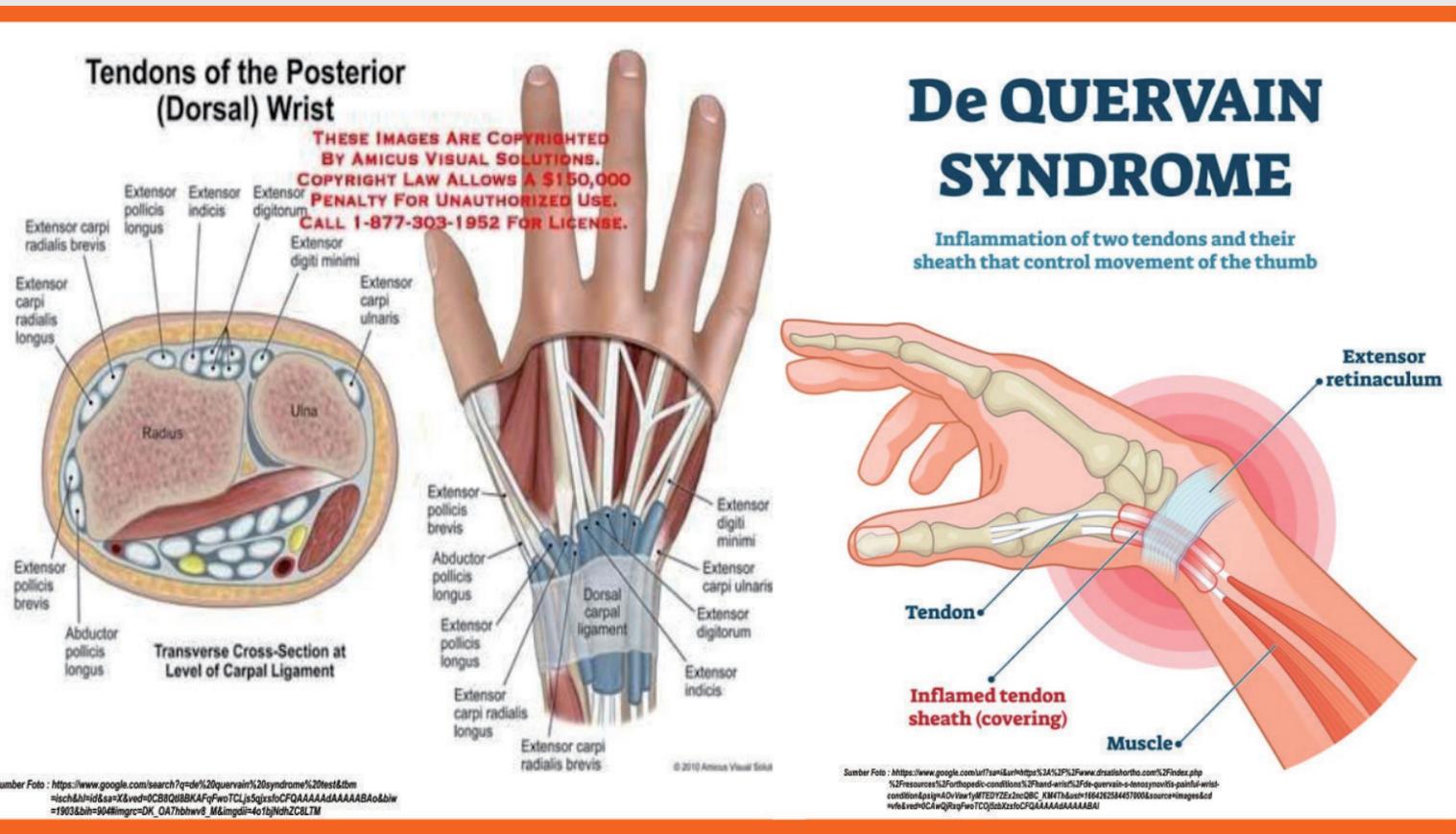
APA ITU SINDROM *DE QUERVAIN* DAN BAGAIMANA PENCEGAHANNYA? MARI KITA BAHAS LEBIH LANJUT.

### 1. Peradangan selubung tendon

Sindrom *De Quervain* adalah peradangan yang terjadi pada selubung (semacam gelang) yang mengelilingi dua tendon yang ada di antara pergelangan tangan dan ibu jari. Apa itu tendon? Tendon merupakan jaringan ikat yang menghubungkan antara otot dan tulang, yang membantu pergerakan tulang. Sindrom *De Quervain* akan ditandai dengan adanya pembengkakan di pangkal ibu jari dan pergelangan tangan disertai rasa nyeri ketika digerakkan. Maka dari itu, penderita akan merasakan sakit ketika memutar pergelangan tangan, menggenggam, atau mengepalkan. Penyakit ini pada dasarnya menurunkan kekuatan otot jempol tangan, sehingga aktivitas apa pun yang menggunakan fungsi jempol dan pergelangan akan terganggu. Saya, dalam hal ini, sejak terserang mengalami nyeri saat menggenggam anak, memasak, menggunakan mouse saat bekerja, dan lain sebagainya.

### 2. Risiko terkena

Dari berbagai sumber mengatakan penyebab penyakit ini belum diketahui pasti. Akan tetapi, tenaga medis yang saya temui meyakini adanya aktivitas berulang dan beban berlebih pada penggunaan ibu jari dan pergelangan tangan menjadi pemicu utamanya. Ditambah, adanya cedera langsung pada pergelangan tangan atau tendon yang saya alami pada saat



Gambar *De Quervain* sumber: kemenkes

menggenggam anak memperparah kondisi tersebut.

Kementerian Kesehatan melalui situs resminya menyebutkan berdasarkan etiologi, penyebab penyakit ini dapat diklasifikasikan menjadi tiga, yaitu *overuse* (penggunaan berlebihan), trauma langsung, dan radang sendi.

Siapa saja yang berisiko terkena sindrom *De Quervain*?

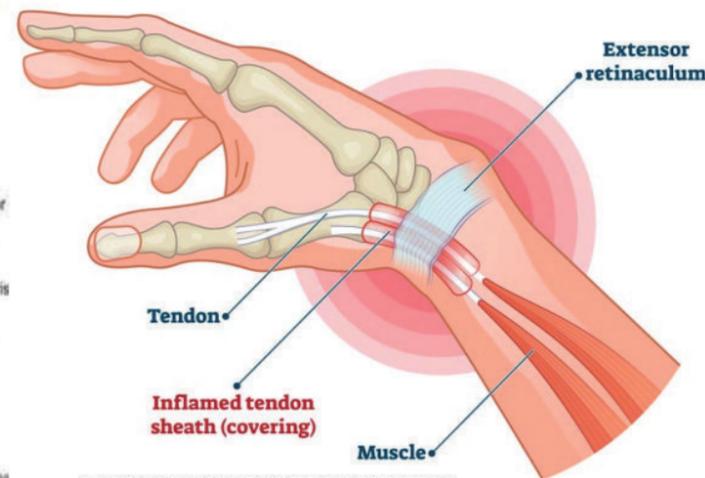
- Orang yang berprofesi menggunakan otot sekitar tangan secara berulang, seperti pemain piano, pemain golf, pemain tenis, pemain game elektronik, dan

pegawai yang sering berinteraksi menggunakan gawai.

- Perempuan, karena perubahan hormon saat kehamilan dan persalinan, serta aktivitas domestik lainnya seperti memasak dan menggenggam anak. Dilansir dari situs resmi Kementerian Kesehatan, menurut riset, perempuan berisiko delapan kali lebih tinggi mengidap *De Quervain* dibandingkan laki-laki.
- Rentang usia 30-55 tahun. Usia produktif lebih rentan terkena penyakit ini karena sedang aktif bekerja dan berkegiatan.

## De QUERVAIN SYNDROME

Inflammation of two tendons and their sheath that control movement of the thumb



terlanjur merasakan nyeri di bagian pergelangan tangan, penggunaan pelindung seperti belat, deker, cukup membantu untuk membatasi gerakan dan mengistirahatkan bagian tertentu.

Bagi para penderita *De Quervain*, penanganan akan dilakukan berdasarkan tingkat keparahan penderita. Untuk mendeteksi adanya sindrom ini, tenaga medis akan melakukan tes Finkelstein, yaitu pasien diminta untuk mengepalkan tangan dengan posisi ibu jari berada di dalam (tergenggam). Lalu pasien diminta untuk membengkokkan tangan ke arah depan. Apabila pasien merasakan sakit, maka dapat dipastikan pasien terserang *De Quervain*.

Sementara itu, pengobatan terhadap penderita dapat dilakukan antara lain sebagai berikut.

- Kompres dingin atau kompres dengan es pada bagian yang terasa nyeri
- Pemberian obat penahan nyeri seperti parasetamol atau ibuprofen
- Pemberian suntikan kortikosteroid di dalam selubung tendon untuk mengurangi pembengkakan
- Fisioterapi untuk melatih mengembalikan kemampuan gerakan ibu jari dan pergelangan tangan
- Memasang belat tangan atau deker untuk mengurangi pergerakan dan tekanan, serta menjaga posisi ibu jari dan pergelangan tangan tetap lurus
- Operasi pada bagian yang masih terasa nyeri jika perawatan lain tidak menghilangkan rasa sakit

Penanganan *De Quervain* tersebut bertujuan untuk mengurangi peradangan dan rasa sakit, mengembalikan kemampuan gerak ibu jari dan pergelangan tangan, serta mencegah kekambuhan. Perlu

dicatat bahwa pembiaran yang dilakukan terhadap penyakit ini dapat membuat rasa nyeri kronis bahkan sangat membatasi gerakan tangan. Salah satu pasien yang saya temui ketika melakukan kontrol di spesialis ortopedik bahkan mengaku hampir menjatuhkan bayinya ketika menggendong karena tangannya yang tak lagi sanggup untuk membawa anaknya.

Hal ini tentunya juga akan membatasi performa dan kenyamanan kita dalam bekerja. Oleh sebab itu, sangat penting untuk menjaga kesehatan diri kita, dan segera menemui tenaga kesehatan apabila sudah merasakan hal yang tidak nyaman pada tubuh. Ingat, jangan membiarkan sakit yang dialami berlarut-larut karena akan memperlambat proses penyembuhan kita. Saya pun terkadang menyesali keputusan saya untuk menunda ke dokter setelah merasakan nyeri pada pergelangan tangan ini. Semoga kita semua selalu dilimpahi kesehatan dan diberikan umur yang berkah.

**Ingat, jangan membiarkan sakit yang dialami berlarut-larut karena akan memperlambat proses penyembuhan kita.**

MOHAMMAD WINDU DARMAWAN

# SI BERUANG MADU, SATWA MASKOT KOTA BALIKPAPAN



**M**ungkin tak banyak yang tahu, beruang madu (*Sun Bear*) merupakan satwa endemik yang menjadi maskot kebanggaan dari kota Balikpapan. Beruang Madu di Balikpapan dikonservasi di sebuah hutan lindung bernama Kawasan Wisata Pendidikan Lingkungan Hidup (KWPLH) Balikpapan dekat Samboja, lokasi Ibukota Baru Indonesia yang berjarak kurang lebih 50 kilometer dari BDK Balikpapan. Bulu beruang madu cenderung pendek, berkilau dan pada umumnya hitam, matanya berwarna cokelat atau biru, selain itu hidungnya relatif lebar tetapi tidak terlalu panjang. Jenis bulu beruang madu adalah yang paling pendek dan halus dibandingkan beruang lainnya, berwarna hitam kelim atau hitam kecoklatan. Ciri khas dari Beruang Madu adalah corak *chevron* warna oranye keemasan pada bagian dadanya yang terlihat jelas ketika dia berdiri.

Beruang Madu memiliki lidah yang panjang hingga 25 sentimeter, kuku tangan atau kaki depan yang panjang, tajam dan melengkung serta taring yang cukup panjang hingga menonjol keluar dari mulut digunakan untuk menggali rayap, semut dan sarang lebah sebagai makanan favorit mereka. Nah jenis makanan favoritnya yang terakhir inilah yang akhirnya membuat hewan omnivora yang bernama latin *Helarctos malayanus* ini akrab dipanggil dengan nama si Beruang Madu. Selain itu, tidak seperti saudara-saudaranya yang lain di wilayah dengan empat musim, Beruang Madu tidak memiliki masa hibernasi karena sumber

makanannya selalu tersedia sepanjang tahun dan merupakan binatang omivora yang memakan makanan apa saja yang mudah ditemukan di hutan seperti aneka buah-buahan dan tanaman tropis seperti cempedak, nangka, durian, bahkan tunas pohon palem.

Beruang Madu merupakan hewan *nocturnal* penyendiri dan pemalu yang lebih aktif di malam hari. Selain itu, mereka banyak bergerak di tanah dengan keempat kakinya dan jarang sekali berdiri dengan dua kaki kecuali sedang ingin menjangkau tempat yang lebih tinggi. Dalam satu hari seekor Beruang Madu dapat berjalan lebih dari 8 kilometer untuk mencari makanan. Berdasarkan penelitian, perilaku Beruang Madu ini berperan signifikan dalam membantu regenerasi hutan karena mereka juga bertindak sebagai penyebar biji dari buah-buahan yang mereka makan karena Beruang Madu memakan buah-buahan secara utuh beserta biji-bijinya, namun pencernaan mereka tidak mampu mengolah biji-bijian sehingga mengeluarkannya kembali secara utuh yang kemudian dapat tumbuh menjadi bibit baru.

Tapi, pertanyaan terbesarnya adalah mengapa ada beruang di Indonesia? Bukannya beruang biasanya memiliki habitat di negara beriklim sub-tropis seperti Amerika, Kanada, Rusia, atau bahkan di Kutub Utara? Apakah di masa lalu pada saat zaman es pulau Kalimantan menjadi satu daratan dengan wilayah-wilayah tersebut? Atau Beruang Madu ini merupakan spesies yang melakukan migrasi dengan jarak yang sangat jauh seperti yang terjadi pada film *Ice Age*? Atau, dia sebenarnya merupakan saudara dari *Honey Badger* yang berhabitat di benua Australia? Hmm jangan-jangan, penduduk asli kota Balikpapan juga masih ada hubungan saudara dengan penduduk asli di Amerika, Kanada, Rusia atau Australia ya? Unik sekali bukan? Dan fakta ini membuat kita semakin tertarik untuk lebih dalam mengenal si Beruang Madu yang ternyata ditemukan tersebar di kawasan Pulau Kalimantan,

Sumatera, Indochina termasuk Myanmar dan Semenanjung Malaka. Pada masa lalu, ternyata Beruang Madu juga diketahui tersebar di seluruh benua Asia. Namun memang saat ini populasi mereka makin sulit untuk ditemukan. Hmm, berarti terdapat kemungkinan si Beruang Madu ini memiliki keterkaitan sejarah dengan Beruang Panda yang ada di China dan Beruang yang berhabitat di Rusia ya Sobat Pemelajar. Atau kalian memiliki teori dan pendapat lain tentang Beruang Madu ini? Seperti contohnya mereka sengaja dibawa ke Kalimantan oleh Tentara Jepang pada Zaman Perang Dunia ke II sebagai hewan peliharaan?

Saat ini Beruang Madu telah dikategorikan sebagai binatang yang mudah diserang oleh predator lain dan masuk ke dalam kategori satwa yang terancam keberlangsungan hidupnya. Ancaman terbesar bagi beruang madu saat ini adalah semakin hilangnya habitat asli mereka yang berupa hutan hujan tropis, termasuk diantaranya disebabkan oleh faktor fragmentasi hutan dan degradasi hutan yang terjadi karena penebangan hutan secara liar serta kebakaran hutan. Selain itu, makin berkurangnya populasi Beruang Madu juga disebabkan oleh terus bertambahnya area pertambangan dan perkebunan sawit di Pulau Kalimantan serta eksploitasi ilegal seperti sirkus dan perdagangan hewan liar, walaupun sebenarnya Beruang Madu ini telah terdaftar dalam *Appendix I of the Convention on International Trade in Endangered Species* (CITES) sejak tahun 1979 yang menyatakan bahwa mereka tidak boleh diburu oleh siapapun.

Kawasan Wisata Pendidikan Lingkungan Hidup Balikpapan sebagai lokasi konservasi Beruang Madu didirikan oleh Pemerintah Kota Balikpapan dan didanai oleh beberapa perusahaan seperti *Chevron* sebagai bagian dari *Corporate Social Responsibility* (CSR) untuk terus melestarikan Beruang Madu ini. Sobat Pemelajar semua dapat mengunjunginya dan bertemu dengan para Beruang Madu secara gratis pada waktu-waktu yang telah ditentukan oleh pengelola. Sangat

disarankan untuk berkunjung pada saat waktu pemberian makan yaitu pada pukul 14.00 WITA sehingga kita dapat melihat mereka lebih dekat. Semoga dengan dimulainya pembangunan Ibukota Negara (IKN) baru di Kalimantan Timur juga membawa pengaruh positif dalam pelestarian satwa-satwa khas Pulau Kalimantan, termasuk Beruang Madu ya sobat pemelajar semua.

Ingin kenal lebih jauh tentang Kota Balikpapan, BDK Balikpapan dan hubungannya dengan Beruang Madu? yuk sobat pemelajar kita jalan-jalan ke Balikpapan. Perjalanan ke Balikpapan dapat ditempuh dengan moda pesawat terbang dengan jarak tempuh kurang lebih 2 jam dari Jakarta atau 1 jam dari Surabaya. Selain pesawat, Perjalanan ke Balikpapan dapat ditempuh dengan menggunakan moda kapal laut yang ditempuh kurang lebih dalam waktu 2 hari 1 malam dari Surabaya. Bagaimana? Kalian semua sudah siap untuk pindah ke Balikpapan, jantung dari Ibukota Negara Baru Indonesia? Jangan lupa packing ya, dan bawa oleh-oleh untuk si Beruang Madu.

**Jalan-jalan ke Balikpapan  
Aduh sakit kaki terantuk batu  
Jakarta jam tujuh disini jam delapan  
Ayo lestarikan si beruang madu**

# GALERI PEKANBARU

FOTO: AHMED KHURDI



## ISTANA SIAK SRI INDERAPURA ATAU ISTANA ASSERAYAH HASYIMIAH ATAU ISTANA MATAHARI TIMUR

Atau yang lebih dikenal dengan sebutan Istana Siak saja, merupakan peninggalan Kesultanan Siak Sri Inderapura. Istana ini merupakan kediaman resmi Sultan Siak yang dibangun pada tahun 1889 sampai 1893, yaitu pada masa pemerintahan Sultan Syarif Hasyim. Kini, lokasi Istana Siak masuk ke dalam wilayah administrasi Kabupaten Siak. Istana ini mengadopsi corak arsitektur Melayu, Arab, dan Eropa.



## MONUMEN PERJUANGAN RAKYAT

Monumen yang terletak di Jalan Diponegoro, Kota Pekanbaru ini merupakan salah satu monumen yang menunjukkan peran masyarakat Riau dalam perang memperjuangkan kemerdekaan Republik Indonesia. Bentuk dasar monumen adalah segi lima yang melambangkan Pancasila sebagai dasar negara. Monumen ini menunjukkan dua pejuang kemerdekaan yang memegang senjata dengan posisi menghadap ke arah tiang bendera tempat Sang Saka Merah Putih di kantor gubernur terletak di jalan Sudirman. Ini menunjukkan makna simbolis perjuangan masyarakat Riau dalam mempertahankan Sang Saka Merah Putih agar tetap berkibar.

Monumen ini dibangun di depan bangunan Lembaga Adat Melayu (LAM) Riau, sebuah lembaga adat daerah yang diprakarsai oleh tokoh-tokoh Melayu Riau dari berbagai latar dan profesi, yang bertujuan untuk melestarikan adat dan budaya Melayu Riau, baik yang bersifat bendawi maupun yang bukan bendawi.



## TUGU TEPAK SIRIH

Tugu ini menggambarkan seorang perempuan berdiri yang memegang tepak sirih. Dalam Budaya Melayu, tepak sirih digunakan untuk menyambut tamu kebesaran yang datang ke sebuah acara. Tamu kebesaran akan diberikan sirih yang akan dimakan sebagai ucapan selamat datang.

Tugu ini berada tidak jauh dari Terminal Bandar Raya Payung Sekaki. Ini memiliki makna simbolis sebagai penyambutan bagi orang yang baru datang dari luar kota dengan sambutan tepak sirih.



## TUGU TARI ZAPIN

Ikon Provinsi Riau yang merupakan titik nol dari Kota Pekanbaru, merupakan patung tembaga dan perak yang diukir oleh I Nyoman Nuarta pada tahun 2011. Tugu ini menunjukkan sepasang Lajang dan Dara yang sedang menari zapin yaitu tari tradisional Melayu.

ISSN: 2086-4833



9 772086 483008



SELALU

JAGA

JARAK

